PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005–2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2005 – 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Banjarbaru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 5

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program walikota.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 6

Sistematika RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025, disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 7

RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Juli 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

AGUS WIDJAJA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingatakan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Banjarbaru dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kota Banjarbaru digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Banjarbaru pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banjarbaru.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru, (b) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (c) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, (d) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan (f) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 11 Tahun 2011
Tanggal : 8 Juli 2011

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kota Banjarbaru 2005-2025

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
I.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 2
I.4 Sistematika Penulisan 3
I.5 Maksud dan Tujuan 4

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 5

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 5
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 16
2.3 Aspek Pelayanan Umum 21
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 32

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 39

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 39
3.2 Isu Strategis 46

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH 47

4.1 Visi Kota Banjarbaru 47
4.2 Misi Kota Banjarbaru 48
4.3 Tujuan dan Sasaran 51

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 52

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijaka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-masing Misi 52
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan 63

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN 82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru dari Tahun 2001-2005 15
Tabel II.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2005 16
Tabel II.3 Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 (%) 17
Tabel II.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 dan Rata-rata Pertumbuhan Selama Periode 2001-2005 (%) 17
Tabel II.5 Nilai PDRB perkapita Kota Banjarbaru Periode Tahun 2001-2005 18
Tabel II.6 Indeks Gini Kota Banjarbaru Tahun 2002-2005 18
Tabel II.7 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis di Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 19
Tabel II.8 Angka Partisifasi Sekolah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 19
Tabel II.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2001-2005 20
Tabel II.10 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Angkatan Kerja di Kota Banjarbaru 20
Tabel II.11 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001-2005 21
Tabel II.12 Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001-2005 22
Tabel II.13 Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001-2005 22
Tabel II.14 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Fasilitasnya di Kota Banjarbaru 23
Tabel II.15 Jumlah Puskesmas Keliling dan Posyandu Tahun 2001-2005 23
Tabel II.16 Jumlah Dokter Menurut Unit Kerja Kesehatan Tahun 2001-2005 23
Tabel II.17 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Menurut Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2001-2005 25
Tabel II.18 Jumlah UKM Menurut Kelompok Sektor di Kota Banjarbaru Tahun 2004-2005 26
Tabel II.19 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 29
Tabel II.20 Luas Tanah Bukan Sawah Menurut Penggunaan (Ha) di Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 29
Tabel II.21 Produk Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 (Ton) 30
Tabel II.22 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 (Kw/Ha) 30
Tabel II.23 Jumlah Luas Area Potensi dan Produksi Perikanan Tahun 2005 30
Tabel II.24 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2005 31
Tabel II.25 Populasi Ternak Besar dan Kecil Tahun 2005 31
Tabel II.26 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi pada Perkebunan Rakyat di Kota Banjarbaru Tahun 2005 32
Tabel II.27 Potensi/Tegakan Hutan 32
Tabel II.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Banjarbaru Tahun 2002-2005 32
Tabel II.29 Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Jalan Tahun 2001-2005 (Km) 33

Tabel II.30 Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pendaftaran Ulang dan Pendaftaran Baru pada UPPD Banjarbaru Tahun 2002-2005 33
Tabel II.31 Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat dari Bandara Syamsudin Noor Tahun 2001-2005 34
Tabel II.32 Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan Serta Jumlah Kamar di Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 34
Tabel II.33 Jumlah Pelanggan Air Minum di Rinci Setiap Kecamatan 35
Tabel II.34 Banyaknya Peristiwa Kejahatan Tahun 2001-2005 36
Tabel II.35 Nama dan Alamat Objek Wisata yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2005 36
Tabel II.36 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 37
Tabel II.37 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif di Kota Banjartbaru Tahun 2001-2005 38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar II.1 Perkembangan Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 (milyar rupiah)..... 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru beserta segenap komponen masyarakat Kota Banjarbaru telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan, ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan kerangka makro perencanaan pembangunan dalam format Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJP Daerah disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dari 2005 sampai dengan 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Acuan utama penyusunan RPJP Daerah adalah rumusan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mendasarkan kepada: (1) gambaran kondisi umum daerah; dan (2) analisis isu-isu strategis. Karena RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum arah pembangunan dua puluh tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan, maka proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan, eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pakar akademisi yang berkompeten dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Nasional.

RPJP Daerah Kota Banjarbaru adalah dokumen perencanaan yang mempunyai masa berlaku 20 tahun. Penyusunannya mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah akan menjadi acuan dalam setiap penyusunan Dokumen Lima Tahunan RPJM Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Dokumen Satu Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-RKPD) untuk skala Daerah, dan Rencana Kerja SKPD untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adanya keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan serta *sharing* pembiayaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

a. Seperti halnya daerah (kabupaten/kota) yang lain, Kota Banjarbaru merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya. Ini mempunyai makna bahwa diperlukan terciptanya keserasian dan kesinambungan pembangunan antar provinsi pada tingkat nasional dan antar kabupaten-kota pada tingkat provinsi.

b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarbaru 2005-2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan. Mengacu disini mempunyai makna bahwa rencana yang disusun berarti mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan riil kota selaras dengan pengembangan dari provinsi dan pusat. Hubungan antara kota dengan pusat dan hubungan antar kabupaten/kota merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarbaru 2005-2025 diarahkan secara simultan untuk mendukung Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu, Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, dan mendukung Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 yaitu,

Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri.

d. Dalam penyusunannya juga memperhatikan RTRWP Kota Banjarbaru yang memiliki jangka waktu 10 tahun dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Gambar I.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

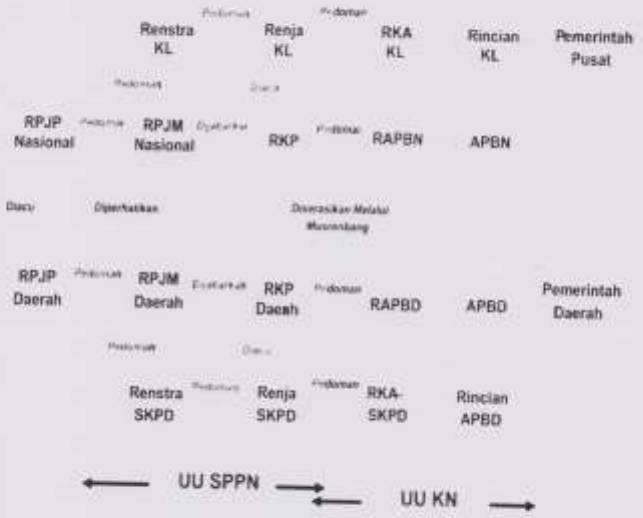

1.4. Sistematika Penulisan

RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan visi serta misi Kota Banjarbaru;
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru;
3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Banjarbaru.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB. 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Letak Kota Banjarbaru sangat strategis karena memiliki akses jalan trans Kalimantan yaitu, di sekitar simpang tiga Liang Anggang yang menghubungkan Banjarmasin-Kotabaru dan Banjarmasin-Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalteng dan Kaltim, juga akses yang terhadap jalan lingkar selatan Liang Anggang dan Pelabuhan Laut Trisakti sebagai gerbang jalur transportasi laut serta akses Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai jalur transportasi udara di Kalimantan Selatan.

Secara geografis, Kota Banjarbaru merupakan penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, Martapura, yaitu dengan jarak 35 km dari Banjarmasin dan 2 km dari Martapura. Secara astronomi terletak pada 3° 25' 40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49 %), 7-25 m (48,46 %), 25-100 m (15,15 %), 100-250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35 m).

Adapun kondisi fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif pertumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah.
2. Klasifikasi Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman < 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan > 90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mempunyai kedalaman efektif lebih 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.
4. Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peta Geologi tahun 1970, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap (Keputusan Presiden) 3,47 persen.

Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk tanah antara lain : batuan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaannya terhadap erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah. Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun

1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lathosol (6,36%) dan Organosol (29,82%).

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka Kota Banjarbaru juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Berdasarkan pemantauan Stasiun Klimatologi Banjarbaru pada tahun 2005, suhu udara di Kota Banjarbaru rata-rata berkisar antara 21,6°C sampai dengan 35,3°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Juni (38,5°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Mei (20,2°C).

Selain itu, sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 75,9% sampai 94,6% dengan kelembaban maksimum tertinggi terjadi pada bulan Januari serta kelembaban minimum terendah terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2005 tercatat 194,5 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September (15 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Maret (357 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 18,25 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (28 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan September (5 hari).

Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2005 berkisar antara 1.004,0 mb sampai dengan 1.008,8 mb, sedangkan rata-rata kecepatan angin sekitar 5,9 knots dengan kecepatan angin maksimum tertinggi yaitu pada bulan Nopember (8,0 knots).

2.1.2. Luas dan Batas Wilayah

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 362,27 km^2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi.

Dari kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Kota Banjarbaru termasuk masuk dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar,

Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur).

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Adapun bencana alam yang rawan di Kota Banjarbaru adalah kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan banjir.

2.1.5. Tata Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memeliharan kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

2.1.5.1. Struktur Ruang

Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

A. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota
   1. Pusat pelayanan kota meliputi
      a. PPK I : Kawasan pusat kegiatan bandar udara internasional di Kecamatan Landasan Ulin
      b. PPK II : Kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
   2. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum yang tersebar di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin.
   3. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

B. Sistem jaringan prasarana wilayah kota
   1. Sistem Prasarana Utama
      a. Transportasi Darat

1. Sistem jaringan jalan
   a. Jaringan jalan arteri primer di kota sepanjang lebih kurang 26.500 km meliputi :
      1. Jalan Liang Anggang-Martapura
      2. Jalan Liang Anggang-Bati-Bati
   b. Jaringan jalan kolektor primer di kota sepanjang lebih kurang 19.000 Km meliputi :
      1. Jalan P. M. Noor (Banjarbaru-Sei. Ulin)
      2. Jalan Mistar Cokrokusumo (Banjarbaru-Banyu Irang)
      3. dan Jalan Gubernur Soebardjo (Liang Anggang-Lingkar Selatan)
   c. Jaringan jalan arteri sekunder di kota sepanjang lebih kurang 16.810 Km yaitu Jalan Trikora.
   d. Jaringan jalan kolektor sekunder di kota sepanjang lebih kurang 10.011,84 Km meliputi :
      1. Jalan Guntung Manggis
      2. Jalan Palam R. O Ulin
      3. Jalan Panglima Batur
      4. Jalan Rahayu
   e. Jaringan jalan lingkungan di kota meliputi jalan yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan pusat-pusat permukiman dengan panjang lebih kurang 486,74 Km yang tersebar di lima kecamatan
2. Transportasi Jalan
   a. Terminal angkutan jalan yang terdapat di Kota Banjarbaru dikategorikan dalam terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 4 (empat) terminal meliputi :
      1. Terminal Liang Anggang di Kecamatan Landasan Ulin
      2. Terminal Pasar Kamaratih di Kecamatan Landasan Ulin
      3. Terminal Simpang Empat Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Utara
      4. Terminal Pasar Bauntung Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Selatan
3. Sistem Jaringan Angkutan Umum
   a. Sistem koridor/utama :
      1. Rute pada jalur Barat-Timur jalan Nasional Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura, menggunkan jalur rute/trayek yang telah ada saat ini, yakni rute Banjarmasin-Martapura (AKDP).
      2. Rute jalan Lingkar Selatan, berawal dari Terminal Liang Anggang-Jalan Lingkar Selatan/Trikora-Jalan Mistar Cokrokusomo-berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru.
      3. Rute Lingkar Utara, berawal dari Terminal Kamaratih-jalan Lingkar Utara-Jalan Karang Anyar-jalan Panglima Batur-jalan A.Yani-berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru.
   b. Sistem sirkulator/pengumpan :
      1. Rute Palam-Loktabat Selatan-jalan A. Yani
      2. Rute Palam-Cempaka
      3. Rute Guntung Manggis-jalan A. Yani-Guntung Payung
      4. Rute Landasan Ulin-Lingkar Selatan-jalan A. Yani
      5. Rute Martapura-Banjarbaru (via jalan Rahayu-jalan Panglima Batur)
   c. Pengembangan Armada Angkutan Umum :

1. Untuk jalur rute Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura, yang merupakan jalur rute utama sistem koridor , serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas penumpang tinggi akan dilayani oleh jenis kendaraan bus besar (kapasitas sekitar 55 tempat duduk).
2. Untuk rute jalan Lingkar Selatan, yang merupakan jalur rute baru sistem koridor, serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas akan dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang (kapasitas 25 tempat duduk).
3. Untuk jalur rute Lingkar Utara, yang merupakan jalur rute baru sistem koridor serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas penumpang sedang juga dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang.
4. Untuk jalur rute sistem sirkulator/pengumpan baik rute eksisting maupun rute baru, akan dilayani oleh jenis kendaraan minibus/mikrolet (kapasitas sekitar 15 tempat duduk)

d. Pengembangan Terminal Angkutan Umum:
1. Terminal eksisting Liang Anggang, yang merupakan terminal tipe C.
2. Terminal eksisting Kamaratih, yang merupakan terminal tipe C.
3. Terminal eksisting Simpang Empat Banjarbaru, merupakan terminal tipe C.

e. Pengembangan halte angkutan umum di arahkan pada lokasi berdekatan dengan simpang jalan akses ke komplek perumahan, simpang jalan utama (arteri) dan jalan kolektor dan di depan lokasi sekolah, perkantoran, pabrik, pasar, rumah sakit dan pusat-pusat aktivitas kegiatan masyarakat.

b. Transportasi udara.

1. Ruang udara diatas bandara,
Ruang udara diatas bandara meliputi ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan).
2. Ruang udara
Ruang udara meliputi ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

c. Bandar udara.
Bandar udara meliputi ruang untuk kegiatan kebandarudaraan yang fungsinya sebagai bandar penumpang dan cargo dengan luas kawasan kurang lebih 400 Ha di Kecamatan Landasan Ulin.

C. Sistem Prasarana Lainnya

1. Jaringan energi/kelistrikan
a. Gardu induk terdapat di Kecamatan Cempaka
b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka dengan Kecamatan Liang Anggang
c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin.
2. Jaringan telekomunikasi
1. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem jaringan prasarana telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan sistem jaringan kabel yang

bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

2. pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* meliputi daerah Kecamatan Liang Anggang (Jalan A. Yani Km 23, Jalan Peramuan, Jalan Soebardjo, Jalan Arah Pleihari), Kecamatan Landasan Ulin (Jalan Sidomulyo, Jalan A. Yani, Jalan Vanili, Jalan Guntung Manggis), Kecamatan Cempaka (Jalan Mistar Cokrokusumo), Kecamatan Banjarbaru Selatan (Jalan Kelapa Sawit 8, Jalan Unlam 3, Jalan Dahlina Raya, Jalan R.O Ulin, Jalan Guntung Paikat, Jalan Candra Buana, Jalan Beringin), Kecamatan Banjarbaru Utara (Jalan P. M. Noor, Jalan Perambaian 1, Jalan Panglima Batur Timur, Jalan Komet Raya, Jalan R. P. Suparto, Jalan Gotong Royong, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Komplek Amaco, Jalan Karang Anyar 1, Jalan Bina Murni, Jalan Bayam, dan Jalan Kebun Karet).
3. Jaringan sumber daya air kota
   a. Wilayah Sungai Kota Banjarbaru berdasarkan lokasinya di tiap kecamatan yaitu :
      1. Kecamatan Banjarbaru, terdiri dari : Sungai Besar (Sungai Kemuning), Sungai Paring, Sungai Ulin, Sungai Lurus, Sungai Komet, Sungai Gotong Royong, dan Sungai Lukudat.
      2. Kecamatan Cempaka, terdiri dari : Sungai Pinang, Sungai Batulicin, Sungai Ujung Murung Hula, Sungai Batu Kapas, Sungai Mangguruh, Sungai Paring, Sungai Sambangan, Sungai Tiung, Sungai Ampayo, Sungai Apukan, Sungai Basung, Sungai Lukaas, dan Sungai Banyu Irang.
      3. Kecamatan Landasan Ulin, terdiri dari : Sungai Salak, Sungai Guntung Payung, Sungai Ampayo, Sungai Paramuan, Sungai Cempaka, Sungai Lukudat, Handil Berkat Karya, Handil Papikul, Handil Hanyar, dan Handil Kerokan.
      4. Kecamatan Liang Anggang : Sungai Paramuan, Handil Berkat Karya, Handil Papikul, dan Handil Hanyar
   b. Sistem jaringan air baku untuk air bersih di Kota Banjarbaru meliputi :
      1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      2. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi
      3. Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan.
   c. Sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Banjarbaru meliputi :
      1. Peningkatan kapasitas alur sungai agar dapat mengalirkan debit banjir dengan aman tanpa terjadinya luapan di sepanjang alur
      2. Normalisasi alur sungai pada ruas sungai yang tidak mampu mengalirkan debit banjir
      3. Perbaikan struktur fisik wilayah sungai dengan prinsip *eco-engineering*, yaitu melindungi tebing sungai dengan vegetasi atau tanaman lokal setempat
      4. Mendukung kinerja bantaran sungai dalam mengamankan DAS yaitu dengan rencana penampang sungai dan jarak bangunan terhadap bibir sungai
      5. Memperbaiki bangunan-bangunan yang dapat menghambat aliran maupun kerusakan alur sungai.

6. Memfungsikan kembali alur sungai yang hilang akibat kegiatan pendulangan (sungai di wilayah Kecamatan Cempaka)

4. Infrastruktur perkotaan.
   a. Penyediaan air minum kota;
      prasarana penyediaan air minum kota adalah sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM, meliputi :
      1. Pengembangan SPAM Kota Banjarbaru ditetapkan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka.
      2. SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.
      3. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
      4. SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
      5. Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
      6. Kapasitas produksi terpasang pada unit produksi SPAM Kota Banjarbaru adalah 247,41 liter/detik
   b. Pengelolaan air limbah;
      1. Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
      2. Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitation*) bagi kompleks perumahan baru.
      3. Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.
      4. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara bertahap pada 5 kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru, untuk tahap awal dilaksanakan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.
   c. Sistem persampahan;
      1. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di Wilayah Kota , ditetapkan di setiap unit RW.
      2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap unit RW atau kawasan seluas 500 - 1.000 m^2.
      3. Pengolahan sampah di TPA menggunakan teknik (*sanitary land fill*), sedangkan sistem pengelolaan sampah di TPS dengan menggunakan sistem *composting*.

d. Sistem drainase kota;
   1. Zona prioritas utama, meliputi Jalan A. Yani (SPBU)-Guntung Simpang Bandara Kiri 2-Gang SMP, Jalan A. Yani-Pertigaan *Traffict* Light Bandara, Sungai Kemuning, dan Sungai Basung,
   2. Zona prioritas kedua, meliputi Sungai Ulin Kanan, Guntung Salak Kiri 1, Guntung Payung Hulu Kiri 1, Guntung Payung Hulu Kanan 1, Guntung Payung Hulu, Guntung Kemuning Kanan 2, Guntung Kemuning Kiri 2, Guntung Paring Kanan 1, Guntung Paring Kiri 2, Guntung Gotong Royong, Guntung Simpang bandara Kiri 3, Guntung Simpang Bandara Kiri 1, Guntung Salak Kiri 2, Guntung Kemuning Kanan 1, Guntung Paring Kiri 1, Guntung Lurus Kiri 1, Guntung Basung Kiri , Guntung Basung Kanan, Guntung Tiung Kiri, Guntung Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Guntung Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 2, Guntung Ampuya Kanan, Guntung Harapan Kiri, Guntung Salak Kanan 1, Guntung Kemuning Kiri 3.
   3. Zona prioritas ketiga, meliputi : Guntung Ulin Kiri, Guntung Ulin Kanan 2, Guntung Ulin Kanan 1, Guntung Lurus Kiri 3, Guntung Lurus Kanan 3, Guntung Lurus Kanan 1, Guntung Payung Kanan, Guntung Payung Hulu Kiri 3, Guntung Lurus Kiri 2, Guntung Lurus Kanan 2.

e. Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
   Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki terletak di Jalan Ahmad Yani km 33-36 dan Lapangan Dr. Murjani.

f. Jalur evakuasi bencana;
   1. Jalan Mistar Cokrokusomo di Kelurahan Sungai Tiung dan Puskesmas.
   2. Jalan Mistar Cokrokusomo di Mesjid Sungai Besung.
   3. Jalan Soekarno Hatta di Komplek Perumahan Griya Lambung Mangkurat.

2.1.5.2. Pola Ruang

A. Kawasan Lindung
   1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terletak di Kecamatan Liang Anggang terbagi Blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Blok II terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dengan luas total kurang lebih 1261,31 Ha.
   2. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan Sungai Kemuning yaitu dengan panjang 7000 meter dan lebar 5 - 12 meter.
   3. Ruang terbuka hijau kota
      a. Ruang terbuka hijau publik terdiri :
         1. taman kecamatan seluas 9,36 Ha
         2. taman kota seluas seluas 1,87 Ha
         3. hutan kota seluas 156,75 Ha
         4. sabuk hijau (*green belt*) seluas 241,35 Ha
         5. pulau jalan dan median jalan 40,06 Ha
         6. jalur pejalan kaki 1,47 Ha
         7. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi seluas 129,87 Ha
         8. RTH sempadan sungai seluas 0,19 Ha

9. pemakaman seluas 28,92 Ha
b. Ruang terbuka hijau privat berupa taman lingkungan perumahan seluas 1,70 Ha.

4. kawasan rawan bencana alam
   a. kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Cempaka.
   b. kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka.
   c. kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin
   d. kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka

B. Kawasan Budidaya.
   1. kawasan peruntukan permukiman;
      a. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin.
      b. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
      c. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang.
   2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
      Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar tradisional (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka), pusat perbelanjaan dan toko modern (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan).
   3. Kawasan peruntukan perkantoran;
      a. Perkantoran pemerintahan yaitu di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.
      b. Kawasan peruntukan perkantoran non pemerintahan terletak di Kecamatan Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang dan Cempaka.
   4. Kawasan peruntukan industri;
      a. Kawasan peruntukan industri skala rumah tangga tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka.
      b. Kawasan peruntukan industri skala kecil tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka.
      c. Kawasan peruntukan industri skala sedang tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara.
      d. Kawasan peruntukan industri skala besar tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang.
   5. Kawasan peruntukan pariwisata;
      a. Pariwisata budaya
         1. Museum Lambung Mangkurat, terletak di Kelurahan Komet.
         2. Mesjid tertua yaitu Mesjid Nurul Hasanah, di Kecamatan Cempaka.
      b. Pariwisata alam
         1. Pendulangan intan, terletak di Kelurahan Sungai Tiung
         2. Agrowisata Perikanan, terletak di Kelurahan Mentaos.
         3. Hutan Pinus, terletak di Kelurahan Mentaos.

4. Danau Seran, terletak di Kelurahan Palam.
5. Wisata Kuliner Penggalaman, terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur,

c. Pariwisata buatan
1. Kolam Renang Idaman, terletak di Kelurahan Kemuning.
2. Taman Van der Viejl, terletak di Kelurahan Komet.

6. Kawasan ruang terbuka non hijau;
a. Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer.
b. Trotoar *(pelestrian way)* yang berada di samping kiri kanan jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat perlu memperhatikan hal teknis bagi pengguna tersebut.
c. Ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai jalur sirkulasi, tempat/lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi pemerintah provinsi/kota.
d. Ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya.
e. Kawasan ruang terbuka biru yaitu permukaan sungai yang meliputi Sungai Kemuning
7. Ruang evakuasi bencana;
a. Ruang evakuasi titik rawan bencana kebakaran meliputi Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin dan Gedung Bina Satria di Kecamatan Banjarbaru Utara.
b. Ruang evakuasi titik rawan bencana tanah longsor meliputi Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta di Kecamatan Cempaka.
c. Ruang evakuasi titik rawan bencana angin puting beliung meliputi Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin.
d. Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir ringan meliputi perkantoran, tempat ibadah dan permukiman masyarakat terdekat
8. Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal (PKL) terletak di Jalan A. Yani dan Jalan Panglima Batur.
9. Rencana kawasan peruntukan lainnya.
a. Kawasan Pertanian
1. Kawasan pertanian lahan kering, tahunan dan perkebunan terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka.
2. Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, diarahkan untuk pengembangan komoditas ternak unggulan sesuai dengan kondisi lokasi yang tersedia dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu ternak sapi dan ternak ayam.
3. Kawasan perikanan, ditetapkan di Kelurahan Mentaos.

b. Kawasan pertambangan terbatas pada usaha pertambangan batuan, berupa pertambangan kaolin yang terletak di Kecamatan Cempaka.

c. Kawasan pelayanan umum
1. Kawasan pendidikan
a. Kawasan pendidikan dasar (TK, SD) lokasinya diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di seluruh kawasan mengingat pengguna fasilitas tersebut adalah anak-anak usia 3 -12 tahun.
b. Kawasan pendidikan menengah (SLTP, SMU, SMK) diarahkan di pusat kecamatan.
c. Kawasan pendidikan tinggi (Akademi, PT) diarahkan untuk dikembangkan ke Kecamatan Banjarbaru Utara.

2. Kawasan kesehatan
   a. Kawasan kesehatan seperti praktek dokter dan apotek yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama dalam kawasan permukiman.
   b. Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan.
   c. Kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Umum di Kelurahan Komet diarahkan untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.
   d. Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.

2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, penduduk Kota Banjarbaru sebanyak 127.538 jiwa, kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 138.211 jiwa, pada tahun 2003 sebanyak 139.386 jiwa, dan pada tahun 2004 sebanyak 143.112. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Kota Banjarbaru adalah sebesar 147.841 jiwa, yang terdiri dari 75.776 penduduk laki-laki dan 72.065 penduduk perempuan.

Tabel II.1.
Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru dari Tahun 2001 sd 2005

No	Kecamatan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Landasan Ulin	58.488	59.817	62.403	38.274	39.370
2	Cempaka	24.961	25.357	26.603	27.498	28.715
3	Banjarbaru Utara	67.047	67.981	70.824	36.228	37.842
Kota Banjarbaru		150.496	153.155	159.830	164.216	171.496

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru cukup tinggi, yaitu mencapai rata-rata 4 persen per tahun. Kota Banjarbaru yang identik sebagai Kota pendidikan di mana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyebabkan banyaknya pendatang yang berdomisili di kota ini untuk menuntut ilmu. Selain itu, posisi Kota Banjarbaru yang cukup strategis baik secara administratif maupun akses ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kota Banjarbaru mendorong perkembangan pembangunan perumahan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir.

Jika dilihat menurut kecamatan, maka penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Banjarbaru, yaitu sebanyak 58.488 orang atau meliputi 23,31 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 16.037, sedangkan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka, yaitu sebanyak 24.961 orang atau meliputi 25,67 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 5.807. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Banjarbaru terdapat banyak rumah tangga tunggal yang umumnya adalah para pelajar dan mahasiswa.

Tabel II.2.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2005

[illegible]	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk
Landasan Ulin	58.448	16.037	107	181,05	323
Cempaka	24.961	5.807	108	146,70	170
Banjarbaru	67.047	19.051	102	34,52	1.942
Kota Banjarbaru	150.496	40.895	105	362,27	415

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

Kepadatan penduduk yang paling tinggi pada tahun 2005 berada di Kecamatan Banjarbaru yaitu sebesar 1.942 orang per km^2 dan kepadatan penduduk yang paling rendah berada di Kecamatan Cempaka yaitu hanya sebesar 170 orang per km^2.

2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu pendekatan pengukuran kemajuan bagi perekonomian di suatu daerah ialah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya. PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Gambar II.1.

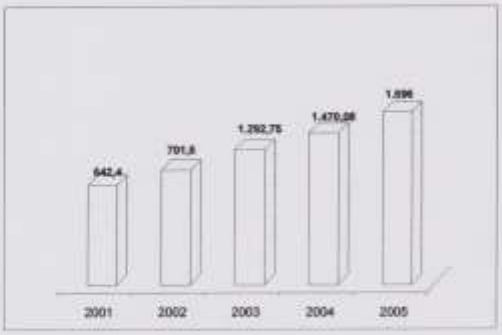

Gambar II.1.
Perkembangan Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Tahun 2001 - 2005 (milyar rupiah)

Selama periode 2001 sampai dengan 2005, perkembangan nominal PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 172 persen yaitu dari sebesar 642 milyar rupiah pada tahun 2001 menjadi 1.696 milyar rupiah pada tahun 2005.

Peningkatan nilai PDRB Kota Banjarbaru dari tahun 2001 sampai 2005 tersebut terutama disebabkan oleh sektor industri, bangunan, perdagangan, dan lembaga keuangan. Keempat sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan dan pertumbuhan nilai PDRB Kota Banjarbaru selama ini.

Tabel II.3
Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005 (%)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertanian	5.91	5.61	5.33	5.06	4.67
Pertambangan dan Galian	10.24	10.57	10.17	9.72	9.57
Industri Pengolahan	17.95	17.04	16.48	16.03	15.14
Listrik, Gas dan Air Minum	1.89	1.99	2.14	2.18	2.28
Bangunan	13.60	14.15	14.37	15.42	17.06
Perdagangan, Restoran dan Hotel	23.80	23.51	23.22	22.57	21.54
Angkutan dan Komunikasi	7.84	8.06	8.12	8.30	8.39
Lembaga Keuang. & Jasa Perusahaan	1.50	2.18	3.54	4.01	4.51
Jasa-Jasa	17.27	16.90	16.63	16.70	16.84
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2004 mengalami sedikit perlambatan. Selama periode 2001 sampai dengan 2005 pertumbuhan PDRB mencapai rata-rata 5,02 persen per tahun.

Pertumbuhan yang paling progresif dialami oleh sektor lembaga keuangan sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah di sektor industri. Sektor ekonomi yang tumbuh diatas rata-rata selama periode tersebut adalah sektor lembaga keuangan keuangan, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air minum, dan sektor angkutan serta sektor perdagangan.

Tabel II.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005
dan Rata-Rata Pertumbuhan Selama Periode 2001 sd 2005 (%)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertanian	3.13	1.92	1.50	1.67	3.04	2,25
Pertamb & Galian	3.76	2.52	0.90	0.35	0.22	1,55
Industri Pengolahan	2.41	0.51	0.86	2.42	3.19	1,88
Listrik,Gas & Air Minum	4.43	6.98	2.28	5.17	9.87	5,75
Bangunan	5.74	5.63	5.34	8.84	8.40	6,79
Perdag, Rest & Hotel	5.07	6.33	6.80	4.77	4.68	5,53
Angkutan & Komunikasi	4.84	5.95	6.25	5.45	5.15	5,53
Lembg Keuangan & Js. Prs	88.29	55.22	59.26	19.49	15.65	47,58
Jasa-Jasa	5.83	3.67	3.02	3.52	4.59	4,13
Total	5.28	4.86	5.19	4.73	5.05	5,02

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran kesejahteraan suatu daerah. Di sisi lain, PDRB per kapita dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakatnya, karena merupakan nilai rata-rata besaran PDRB untuk tiap orang penduduk. PDRB per kapita meskipun lebih indikatif bagi pengukuran tingkat kesejahteraan namun belum menggambarkan tingkat pemerataan antar penduduk. PDRB Per Kapita berdasarkan harga berlaku selama periode 2001 sampai dengan 2005, meningkat sekitar 30,58 persen yaitu dari 5,05 juta rupiah per tahun pada tahun 2001 menjadi 6,6 juta rupiah per tahun pada tahun 2005.

Tabel II.5
Nilai PDRB Per Kapita Kota Banjarbaru Periode Tahun 2001 sd 2005

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)
2001	5.057.316	421.443
2002	5.317.149	443.096
2003	5.568.247	464.021
2004	5.861.179	488.432
2005	6.603.789	550.316

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Banjarbaru relatif konstan dalam periode 2001 sampai dengan 2005. Berdasarkan angka indeks gini (Gini Ratio), maka tingkat distribusi pendapatan selama ini tergolong pada pemerataan sedang. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak berlangsung tajam. Perbedaan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi tidak terlalu jauh diatas kelompok berpendapatan rendah.

Tabel II.6
Indeks Gini Kota Banjarbaru Tahun 2002 sd 2005

Tahun	Nilai
2002	0,29
2003	0,31
2004	0,26
2005	0,31

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

2.1.2. Kesejahteraan Sosial

Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas. Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan diukur dengan 2 variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Sepanjang pembangunan Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2005, keberhasilan dalam bidang pendidikan tidak selalu menunjukkan hasil yang positif. Dari Tabel II.7. dapat dilihat bahwa perkembangan angka melek huruf tidak selalu menunjukkan arah yang positif, demikian juga rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian secara umum hingga tahun 2005, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banjarbaru telah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

Pada tahun 2001, angka melek huruf Kota Banjarbaru telah mencapai 92,96 persen dan rata-rata lama sekolah mencapai 9,3 tahun. Namun 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, angka melek huruf bertambah sebesar 3,26 persen sedangkan selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2005 rata-rata lama sekolah tidak berubah. Angka melek huruf Kota Banjarbaru berada pada peringkat kedua setelah Kota Banjarmasin sedangkan rata-

rata lama sekolah Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.7
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005

Tahun		
2001	92,96	9,30
2002	94,50	9,30
2003	93,20	9,30
2004	93,47	9,30
2005	96,22	9,30

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Indikator lainnya dari keberhasilan pendidikan tercermin pada tingkat partisipasi pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2005 terjadi kenaikan tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan SD dan SLTP namun tidak pada jenjang SLTA. Pada tahun 2005, Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 94,89 APM SLTP sebesar 76,39 dan APM SLTA sebesar 60,63.

Tabel II.8
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005

Tahun			
2002	93,65	71,94	61,79
2003	91,14	67,78	57,28
2004	92,76	71,94	51,09
2005	94,89	76,39	60,63

Sumber : Susenas, BPS

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan Kota Banjarbaru dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga tahun 2005, yaitu dari 66,40 tahun pada tahun 2002 hingga menjadi 66,6 tahun pada tahun 2005. Dibandingkan rata-rata penduduk Kalimantan Selatan keseluruhan, angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru jauh lebih tinggi.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk strategi penanggulangan kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam

menfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemikinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut pendekatan ini penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) dibangun atas 2 komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel II.9
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2001 sd 2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2001	7,5	6,12
2002	6,4	4,85
2003	8,1	5,85
2004	6,6	4,62
2005	6,6	4,53

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan, BPS

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 terlihat berfluktuatif, baik secara jumlah maupun persentase. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 dari tahun sebelumnya, yaitu 7,5 ribu penduduk menjadi 6,4 ribu penduduk. Demikian juga persentase penduduk miskin pada tahun 2004 menurun tajam dari 5,85 persen menjadi 4,62 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu indikator keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menunjukkan persentase penduduk yang aktif secara ekonomi dibanding penduduk usia kerja. TPAK Kota Banjarbaru selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, TPAK mengalami penurunan dibanding tahun 2003, yaitu dari 56,55 persen menjadi 53,78 persen. Namun pada tahun berikutnya TPAK Kota Banjarbaru mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu menjadi 59,50 persen pada tahun 2005.

Pengangguran juga menjadi isu yang cukup strategis dalam konteks pembangunan suatu wilayah. Pengangguran menunjukkan kurangnya lapangan usaha yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian di suatu wilayah. Pengangguran ini membawa dampak pada menurunnya pendapatan serta daya beli sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat. Sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005, tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi di tahun 2002. Pada tahun 2004, angka pengangguran hanya sebesar 8,71 persen, kemudian pada tahun 2005 naik sebesar 0,67 persen menjadi 9,38 persen.

Tabel II.10
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Kelompok Angkatan Kerja
di Kota BanjarbaruTahun 2001 sd 2005

Tahun				
2002	58.655	48.819	51,64	22,6
2003	55.719	42.804	56,55	9,39
2004	55.767	47.925	53,78	8,71
2005	63.882	43.485	59,50	9,38

Sumber : Susenas diolah, BPS

3.1.3 Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan bidang seni dan budaya sangat penting. Keanekaragaman seni budaya menjadi sumber inspirasi pembangunan di segala bidang. Dua sektor ini juga bagian dari industri kreatif–industri yang sedang gencar dikembangkan pemerintah. Sudah menjadi fakta terang bahwa banyak daerah dikenal berkat seni dan budayanya. Oleh karenanya pemerintah daerah harus ikut andil mengembangkan seni budaya. Seni budaya bukanlah bisnis yang gampang mendatangkan uang. Perlu modal besar untuk membangun gedung dan sarana pendukung yang lain.

Pembangunan seni budaya di Kota Banjarbaru antara lain dapat dilihat dari perkembangan jumlah organisasi kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kota Banjarbaru. Sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005, jumlah organisasi kesenian terus mengalami peningkatan di setiap kecamatan. Pada tahun 2001 terdapat 25 organisasi kesenian di Kota Banjarbaru dan pada tahun 2005 jumlah organisasi kesenian tersebut telah berkembang menjadi 27 buah. Kecamatan yang paling banyak memiliki organisasi kesenian adalah Kecamatan Banjarbaru sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Cempaka.

Upaya memasyarakatkan olah raga serta mengolahragakan masyarakat, bagi pembinaan olah raga, agar tercipta masyarakat yang sehat mental baik jasmani maupun rohani. Meningkatkan prestasi di berbagai bidang olah raga terus ditingkatkan melalui pembinaan olahragawan, pemantauan dan pencarian bibit, pelatihan dan mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga. Sementara itu jumlah sarana (lapangan olahraga) yang relatif belum memadai, jumlah dan kualitasnya terus diupayakan baik oleh Pemerintah maupun atas partisipasi dari masyarakat dan kalangan pengusaha.

3.2. Aspek Pelayanan Umum

3.2.1. Pelayanan Wajib

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan syarat mutlak untuk pembangunan. Peningkatan jumlah sekolah akan memungkinkan daya tampung yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Kota Banjarbaru merupakan kota pelajar bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan umumnya. Banyak tersedia pilihan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan kualitas yang lebih baik di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru juga berupaya untuk meningkatkan jumlah serta kualitas sekolah yang ada agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, baik Provinsi Kalimantan Selatan maupun daerah lainnya. Sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005 telah terjadi penambahan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tabel II.11
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001 sd 2005

SD	69	69	69	68	68
SLTP	13	13	12	12	12
SLTA	8	9	10	10	10
SMK	7	7	7	8	8

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Di Kota Banjarbaru juga tersedia lebih banyak perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu dibanding daerah lain. Hal ini merupakan daya tarik bagi para pelajar untuk menuntu ilmu di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan yang penuh terhadap keberadaan perguruan tinggi tersebut. Hingga tahun 2005, terdapat 12 perguruan tinggi di Kota Banjarbaru. Penambahan jumlah perguruan tinggi pada tahun 2001 dari 9 menjadi 10 karena berdirinya Akademi Kesehatan Gigi, dan penambahan jumlah Perguruan Tinggi dari 10 menjadi 12 karena berdirinya Stikes Cahaya Bangsa dan STIMIK.

Di Kota Banjarbaru juga terdapat Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang merupakan universitas negeri tertua di Pulau Kalimantan dengan fakultas yang tersedia dari berbagai jurusan yaitu fakultas Kedokteran, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Teknik, FKIP (Jurusan Olahraga dan DII PGSD), MIPA.

Keberadaan berbagai perguruan tinggi ini memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat Kota Banjarbaru serta membuka peluang untuk mengembangkan berbagai usaha di Kota Banjarbaru yang pada akhirnya akan turut memberikan dorongan postif terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tabel II.12
Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2001 sd 2005

SD sederajat	224	228	233	242	231
SLTP sederajat	332	347	375	383	336
SLTA sederajat	330	320	375	305	261

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Jumlah sekolah di suatu daerah seharusnya memiliki keterbandingan yang proporsional dengan jumlah penduduk usia sekolah. Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah hendaknya diiringi dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan SD sederajat, rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah berkisar antara 224-242. Sedangkan pada jenjang SLTP, rasionya berkisar antara 332-383. Penurunan rasio penduduk usia 16-18 terhadap sekolah SLTA mengalami penurunan yang cukup tajam sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005. Penurunan rasio ini menunjukkan semakin kecilnya partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada SLTA, namun disisi lain harus dilakukan pemantauan secara berkala sehingga rasio penduduk terhadap sekolah meningkat.

Tabel II.13
Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001 sd 2005

SD sederajat	17	18	17	18	18
SLTP sederajat	8	11	17	12	12
SLTA sederajat	12	12	12	8	8

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Jika dilihat rasio murid terhadap guru, maka rasio murid-guru semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang pendidikan SD atau sederajat,

rasio murid guru adalah sebesar 17 dan naik menjadi 18 pada tahun 2002 dan 2004. Artinya secara rata-rata 1 orang guru SD di Kota Banjarbaru harus menangani 18 orang murid. Sedangkan rasio murid guru pada jenjang SLTP dan SLTA sederajat pada tahun 2001-2005 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005, 1 orang guru SLTP harus menangani 12 orang murid sedangkan 1 orang guru SLTA harus menangani 8 orang murid.

Pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru dapat dicerminkan oleh ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Pada tahun 2005, fasilitas kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru terdapat 4 buah puskesmas dan 10 buah puskesmas pembantu dengan jumlah dokter sebanyak 44 orang yang terdiri dari 27 dokter umum, 8 dokter gigi dan 9 dokter spesialis dan tidak ada dokter ahli.

Tabel II.14
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Fasilitasnya di Kota Banjarbaru
Tahun 2001 sd 2005

Tahun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2001	-	4	10	-	14
2002	1	4	12	-	17
2003	-	4	10	-	14
2004	-	4	10	-	14
2005	-	4	10	-	14

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Tabel II.15
Jumlah Puskesmas Keliling dan Posyandu Tahun 2001 sd 2005

Tahun	[illegible]	[illegible]
2001	4	96
2002	4	101
2003	9	105
2004	9	92
2005	7	111

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Tabel II.16
Jumlah Dokter Menurut Unit Kerja Kesehatan Tahun 2001-2005

Tahun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2001	-	-	7	4
2002	-	-	10	3
2003	8	8	19	6
2004	1	8	25	6
2005	-	9	27	8

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mengingat pentingnya lingkungan hidup ini maka diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Secara umum permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota Banjarbaru berupa (1) belum mantapnya penegakan hukum, (2) pemanfaatan SDA-LH kurang memperhatikan kaidah konservasi sehingga menyebabkan pertambahan luasan lahan kritis, rusaknya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati; (3) kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup; (4) sering terjadinya banjir, tanah longsor, dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan; (5) meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air (6) Belum sinkronnya RTRWK dengan RTRWP; (7) belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; dan secara internal kelembagaan masih kurangnya data dan informasi yang terkait dengan PSDAL.

Dampak ekologis dari rusaknya DAS dan Sub-DAS (daratan dan perairan) adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang dirasakan hampir terjadi setiap tahun (musiman) terutama di Kecamatan Cempaka. Selain masalah banjir dan longsor, pada musim kemarau di Kota Banjarbaru sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini merupakan produksi gas rumah kaca yang berdampak kepada pemanasan global.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Propvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan. Beberapa tugas dan fungsi institusi kependudukan dan catatan sipil, diantaranya adalah penataan sistem informasi data kependudukan, penataan sistem pelayanan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan beberapa tugas dan fungsi yang lain, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, adanya ketentuan dan peraturan yang mengikat, termasuk penyedian fasilitas infrastruktur dan sistem pendanaan yang memadai.

Permasalah yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diantaranya adalah *1)* keterbatasan pemerintah daerah dalam menyediakan berpagai fasilitas dan anggaran, 2) kinerja, motivasi dan kompetensi petugas, 3) belum optimalnya sistem SIAK, 4) kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem kependudukan dan catatan sipil. Tantangan ke depan adalah tersedianya fasiltas dan anggaran yang memadai, meningkatkan motivasi dan kompetensi petugas, mengoptimalkan sistem SIAK, dan meningkatkan sosialisasi pentingnya amdinsitrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat

Budaya dan ideologi patriarki selama ini relatif menghambat peran dan keberdayaan perempuan. Konstruksi sosial yang ada menyebabkan ketimpangan peran bahkan mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan sebenarnya berkaitan dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan serta menghindari terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan justru mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga. Upaya pemberdayaan perempuan diperlukan adanya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri dan perkembangan sosial yang terjadi dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan serta kepentingan kehidupan keluarga.

Pelaksanaan kerjasama dengan mitra pegiat gender misalnya termasuk kampanye dan sosialisasi soal kekerasaan rumah tangga adalah bagian dari upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu peningkatan pengetahuan dalam pemahaman kesehatan, pendidikan dan ekonomi rumah tangga dengan bekerjasama berbagai pihak sebagai upaya pemberdayaan perempuan.

Setidaknya tujuan utama adalah keberlangsungan pendidikan dan pertumbuhan sumberdaya manusia dalam rumah tangga maupun peran perempuan dalam ranah publik. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah persoalan anak terlantar dan anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari orangtua maupun keluarga yang mengalami peningkatan dari tahun- ke tahun. Persoalan ini ditangani oleh pemerintah dan swasta.

Salah satu indikator penanganan terhadap perlindungan anak adalah tertampungnya pada panti asuhan baik dimiliki oleh swasta/ormas, pemerintah maupun swasta/ormas yang dibantu pendanaan dan pembinaan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Tantangan kedepan adalah perlunya pemetaan lebih intensif terhadap penanganan anak terlantar dan penduduk lansia untuk dilindungi dan penataan/pembinaan secara intensif penanganan terhadap anak asuk maupun lansia oleh pengelola panti, agar tercermin kelayakan pengasuhan dan pelayanan. Disamping itu kegiatan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang mendorong keberdayaan perempuan.

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan manusia itu sendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 disebutkan bahwa Program KB merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkulaitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian, kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Sejalan dengan upaya tersebut di atas, sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah akseptor KB aktif di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah akseptor KB aktif bertambah 3.379 peserta. Pada tahun 2001, peserta KB aktif hanya berjumlah 16.528 orang, dan pada tahun 2005 peserta KB aktif mencapai 19.907 orang. Peserta KB aktif di Kota Banjarbaru memiliki kecenderungan menggunakan 4 alat KB, yaitu IUD, Implan, Suntikan serta Pil. Sedangkan alat KB yang lain masih kurang diminati dan diterima oleh masyarakat.

Tabel II.17
Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Menurut Pemakaian Alat/Cara KB
Tahun 2001 sd 2005

Tahun	IUD	MOW	MOP	Implan	Suntikan	Pil	Kondom	Jumlah
2001	2.106	37	1.079	1.432	4.325	7.362	185	16.528
2002	2.091	42	1.094	1.518	5.080	7.301	208	17.334
2003	1.336	29	841	1.298	5.700	9.277	260	18.741
2004	1.324	30	852	1.380	5.943	9.311	254	19.094
2005	1.096	40	771	1.235	7.323	9.176	226	19.907

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka

Ketersediaan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial perlu dibedakan berdasarkan kelompok PMKS. Khusus untuk masyarakat miskin, upaya mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu dan anak perlu didukung dengan intervensi yang langsung diberikan kepada mereka, berupa insentif untuk mengakses pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat, demikian juga halnya dengan akses pelayanan pendidikan. Di samping cakupan yang rendah, kegiatan bantuan sosial bagi PMKS yang selama ini dilakukan masih tumpang tindih. Penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program

lainnya. Masalah ini dapat dihindari jika penajaman pada tingkat kebijakan dan penetapan sasaran program dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, pada tingkat pelaksanaan, masalah kelembagaan masih mendominasi permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial. Alih fungsi panti sosial, yang sebelumnya dibangun oleh Pemerintah, di beberapa daerah digunakan untuk kegiatan selain pelayanan kesejahteraan sosial. Sementara itu, upaya pemberdayaan sosial yang seharusnya meletakkan berbagai upaya untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal. Keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS masih lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga bantuan yang disediakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna.

Berdasarkan data kependudukan yang dilaporkan BPS Kota Banjarbaru dalam Banjarbaru Dalam Angka 2005/2006 jumlah Keluarga Pra Sejahtera mencapai 900 kk dan Keluarga Sejahtera mencapai 35.322 KK dari total 36.222 KK. Dari data tahapan keluarga sejahtera, Kota Banjarbaru relatif mengalami proses perbaikan tahapan kesejahteraan penduduk hingga ke Tahapan Keluarga Sejahtera III.

Keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik di Banjarbaru ternyata mampu memberikan kontribusi positif bagi akselerasi pembangunan daerah. Dengan fungsinya yang mengemban tugas di bidang komunikasi dan informasi sekaligus sebagai media hiburan masyarakat.

Jumlah perpustakaan di Kota Banjarbaru didukung oleh perpustakaan di sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi, mesjid, taman bacaan di bawah binaan Dinas Pendidikan. Untuk menjangkau layanan baca bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses keberadaan perpustakaan, terutama di daerah, telah tersedia armada perpustakaan keliling. Salah satu perpustakaan yang cukup lama di Kota Banjarbaru yakni Perpustakaan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balitra) berdiri sejak tahun 1966 memiliki koleksi sebagian besar berupa publikasi dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian lahan rawa dengan pelayanan menggunakan sistem pelayanan terbuka. Untuk menghadapi tantangan global, maka jumlah judul buku dan bahan koleksi perlu terus ditingkatkan di setiap perpustakaan guna meningkatkan gairah minat baca di kalangan masyarakat.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pemerintah berusaha menerapkan kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan sumberdaya lokal. Diantara kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut adalah dengan mendorong tumbuhnya jumlah UKM. Berdasarkan hasil survei mengenai UKM yang dilakukan selama tahun 2004-2005, tercatat jumlah usaha kecil dan menengah meningkat sebesar 401 dari 11.645 jumlah usaha menjadi 12.046 jumlah usaha.

Tabel II.18
Jumlah UKM Menurut Kelompok Sektor di Kota Banjarbaru Tahun 2004 sd 2005

1	Pertamb. Rakyat, Penggalian, & Indust. Kecil Kerajinan Ruta	776	777
2	Konstruksi/ Bangunan	1.019	1.036
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	5.531	5.828
4	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.407	1.511
5	Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi	1.650	1.684
6	Perantara Keuangan dan Jasa-jasa	1.262	1.210
Jumlah		11.645	12.046

Dari tabel II.18 dapat diketahui bahwa kelompok sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi atau rumah tangga merupakan kegiatan UKM yang dominan di Kota Banjarbaru dari total UKM yang ada. Kondisi tersebut didukung antara lain oleh terjangkaunya modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha kelompok sektor tersebut yang pada umumnya merupakan usaha yang menjual kebutuhan primer yang banyak dikonsumsi masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah budaya masyarakat setempat yang pada umumnya berkemampuan dalam bisnis perdagangan.

Posisi terbesar kedua ditempati oleh kelompok sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Dimana kegiatan usaha yang dominan dalam kelompok sektor ini adalah usaha angkutan. Hal ini bisa dimengerti, karena usaha angkutan merupakan usaha pendukung sektor lainnya. Kelompok sektor ini mempunyai peluang cukup besar untuk terus mengalami perkembangan dengan banyak dibukanya daerah pemukiman baru yang belum terjangkau oleh angkutan yang sudah ada.

Kegiatan usaha yang menempati posisi terbanyak ketiga adalah kelompok sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini dapat dilihat dari fenomena menjamurnya warung makan dan minum di Kota Banjarbaru.

Kegiatan penanaman modal di Banjarbaru dilakukan dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru. Dinas ini tidak bekerja sendiri namun melakukan kerja sama secara intensif dengan instansi-instansi terkait terutama Bappeda, Sekretariat Daerah, dan SKPD lainnya. Kegiatan penanaman modal yang diarahkan secara integratif dalam sistem administrasi NKRI mengakibatkan Pemerintah Daerah selaku pelaksana harus selalu mengacu pada peraturan dari pusat, termasuk dalam pemberian berbagai fasilitas dan insentif bagi investor.

Selama ini pemerintah Kota Banjarbaru lewat SKPD yang berwenang memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Baik pembinaan lewat kegiatan seminar, sosialisasi pembangunan, pelibatan kegiatan pemerintah, pertukaran pelajar dan pemuda, pelatihan maupun kegiatan yang bersifat kompetesi prestasi.

Sekalipun berbagai institusi memiliki kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan memerankan pemuda baik bersifat intelektual-akademis, keterampilan, sosial dan olahraga, namun peran pemerintah untuk melepaskan para pemuda dari jeratan narkoba adalah pekerjaan yang relatif berat. Dalam konteks pelayanan di bidang hukum, peran pemerintah kota sangat terbatas. Hal ini terkait dengan kewenangan yang amat terbatas dalam bidang ini.

Pelayanan pemerintah Kota Banjarbaru dalam bidang politik secara khusus ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas). Secara garis besar, Dalam bidang Politik, Badan ini berfungsi untuk melakukan hal-hal sebaga berikut :

1. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan;
2. Melakukan pembinaan terhadap partai politik di Banjarbaru;
3. Melakukan berbagai program peningkatan kesadaran berbangsa, bernegara, termasuk pendidikan politik kepada masyarakat Kalimantan Selatan

Dalam konteks melakukan pendataan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan, Badan ini berwenang untuk menentukan legal atau tidaknya suatu organisasi sosial kemasyarakatan, semacam LSM dan Perkumpulan Sosial lainnya melalui penerbitan SKOT. Organisasi yang diakui keberadaan oleh Badan ini saja yang dapat melakukan berbagai kerjasama atau menerima bantuan dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Selain itu, penerbitan SKOT juga berfungsi sebagai data dasar untuk melakukan pembinaan lebih

lanjut terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada sebagai agen sosial di masyarakat.

Partai politik juga tidak luput dilakukan pembinaan oleh Badan ini, termasuk dalam fungsi ini adalah melakukan koordinasi berkelanjutan dengan partai-partai politik yang ada dan dinyatakan sah keberadaannya oleh Kementrian Hukum dan HAM. Pembinaan lain adalah dengan melakukan pendidikan politik terhadap kader dan fungsionaris partai politik. Koordinasi dengan partai politik menjadi sangat penting guna menciptakan kondisi politik daerah yang baik dan harmonis.

Di ranah masyarakat, fungsi-fungsi pelayanan politik dilakukan dengan menggelar berbagai agenda kegiatan, seperti pendidikan bela negara, pendidikan politik dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap politik dan hal-hal lain terkait kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pelayanan dalam bidang hukum yang dilakukan pemerintah kota adalah pembuatan berbagai produk hukum daerah, seperti perda, peraturan gubernur dan keputusan gubernur dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat Banjarbaru dalam berbagai dimensi kehidupan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.

Selain itu, pelayanan lain di bidang ini dilakukan oleh pemerintah kota dalam bentuk penyuluhan hukum pada masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan terutama diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas produk hukum daerah, namun juga dilakukan hal serupa untuk produk-produk hukum nasional, baik berupa UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2.2. Pelayanan Pilihan

Sektor pertanian di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu walau dengan pertumbuhan yang relatif rendah pada periode tahun 2001 sd 2005, yaitu di bawah 5 persen. Sektor pertanian didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, dengan kontribusi hampir mencapai 50 persen dari nilai PDRB sektor pertanian. Secara umum, sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, dan sub sektor kehutanan memiliki kontibusi yang stabil terhadap PDRB sektor pertanian di Kota Banjarbaru. Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya adalah satu-satunya sub sektor yang kontribusinya meningkat dari waktu ke waktu dan memiliki nilai pertumbuhan yang selalu positif dan cukup stabil. Sedangkan sub sektor yang kontribusinya mengalami penurunan terhadap PDRB sektor pertanian adalah sub sektor perikanan, yaitu dari sekitar 25 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 20 persen pada tahun 2005.

Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dan sub sektornya dalam PDRB Kota Banjarnaru selama periode tahun 2001 sampai dengan 2005 dapat dirinci dalam Tabel II.19 berikut ini :

Tabel II.19
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB
Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005

Deskripsi	2001	2002	2003	2004	2005
Konstribusi (Persen)					
1. Tanaman Pangan	49.67	48.31	47.64	46.26	45.51
2. Tanaman Perkebunan	4.73	5.43	5.64	5.58	5.53
3. Peternakan dan Hasilnya	21.28	21.58	22.55	23.70	24.98
4. Kehutanan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5. Perikanan	24.30	24.65	24.14	24.43	23.96
PDRB Pertanian (Rp. Milyar)	37.77	39.13	40.70	42.63	45.58
Pertumbuhan (Persen)					
1. Tanaman Pangan	2.23	0.13	0.70	0.77	3.01
2. Tanaman Perkebunan	13.82	16.42	5.05	2.63	3.07
3. Peternakan dan Hasilnya	7.49	5.40	3.26	3.35	5.35
4. Kehutanan	-0.89	-1.09	-0.06	1.54	1.34
5. Perikanan	-0.42	-0.30	0.75	1.71	0.91
PDRB Pertanian (Persen)	3.13	1.92	1.50	1.67	3.04

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Relatif rendahnya nilai output, kontribusi, serta pertumbuhan sektor pertanian dan sub-sub sektornya dalam PDRB Kota Banjarbaru tentunya disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia atau digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Luas sawah di Kota Banjarbaru pada Tahun 2005 adalah seluas 3.393 Ha dan tanah yang bukan sawah berjumlah seluas 33.737 Ha.

Tabel II.20
Luas Tanah Bukan Sawah Menurut Penggunaannya (Ha)
di Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005

Jenis Penggunaan Lahan	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pekarangan	8.005,0	.045,0	9.037,0	7.857,0	7.857,0
2. Tanaman Hortikultura/palawija	4.596,0	4.893,0	3.014,0	3.014,0	3.014,0
3. Penggembalaan/Padang Rumput	291,5	298,5	395,2	395,2	395,2
4. Sementara Tidak Di usahakan	7.285,0	7.236,0	6.093,6	6.586,6	6.586,6
5. Ditanami Pohon Hutan Rakyat	3.175,0	2.762,0	315,0	315,0	315,0
6. Hutan Negara	85,0	85,0	326,0	326,0	326,0
7. Perkebunan	1.862,0	1.711,0	783,0	782,3	782,3
8. Lain-lain	4.210,5	4.107,0	11.811,2	12.745,0	12.745,0
9. Rawa-rawa yang tidak ditanami	353,0	353,0	1.662,0	1.662,0	1.662,0
10. Kolam/Tebat	40,0	43,0	39,0	54,0	54,0
Jumlah	29.903,0	29.533,5	33.476,0	33.737,0	33.737,0

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Berbagai komoditas yang menjadi produk sektor pertanian di Kota Banjarbaru adalah padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, dan buah-buahan. Dari berbagai komoditas tersebut, komoditas yang terbanyak di produksi adalah padi sawah, buah-buahan, sayuran, dan ubi kayu. Jumlah produksi padi sawah pada Tahun 2005 di Kota Banjarbaru yaitu sebesar 12.266 ton dengan rata produksi 31,74 Kw/Ha. Jika dilihat per kecamatan, maka luas tanam dan produksi tertinggi terjadi di Kecamatan Cempaka. Namun, produktivitas rata-rata per hektar padi sawah tertinggi terjadi di Kecamatan Liang Anggang. Berdasarkan data tahun 2005, diketahui bahwa rumah tangga

tani yang memproduksi sayuran di Kota Banjarbaru berjumlah 3.676 rumah tangga dan rumah tangga tani yang memproduksi buah-buahan berjumlah 4.511 rumah tangga.

Tabel II.21
Produksi Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005 (Ton)

Jenis Tanaman	2001	2002	2003	2004	2005
Padi sawah	4,198	6.180	6,259.42	8,506.40	12,266.00
Padi Ladang	49.476	-	-	-	-
P.Sawah + Ladang	53.674	6.180	6,259.42	8,506.40	12,266.00
Jagung	41.340	171	1,204.70	85.00	141.34
Kedelai	-	-	-	-	-
Kacang Tanah	10	14	6.20	67.00	66.00
Kacang Hijau	1	-	-	-	-
Ubi Kayu	33	724	45.30	2,425.00	50.50
Ubi Jalar	165	39	4.10	-	-
Sayuran	96	840	20.50	10,554.00	1,414.50
Buah-buahan	51	456	462.50	5,955.00	6,322.00

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Tabel II.22
Produktivitas Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2001 sd 2005 (Kw/Ha)

Jenis Tanaman	2001	2002	2003	2004	2005
Padi sawah	38,480	31,89	29.46	28.00	31.74
Padi Ladang	10,000	-	-	-	-
P.Sawah + Ladang	12,23	31,09	29.43	28.00	31.74
Jagung	13,30	14,25	111.03	60.71	36.48
Kedelai	-	-	-	-	-
Kacang Tanah	-	11,67	5.00	74.44	11.00
Kacang Hijau	0,200	-	-	-	-
Ubi Kayu	-	127,02	7.02	1,031.90	99.67
Ubi Jalar	50,850	97,5	1.95	-	-
Sayuran	51,350	42,21	1.29	150.34	1.21
Buah-buahan	-	95,00	5.38	815.75	33.54

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Sementara itu, potensi sektor perikanan di Kota banjarbaru cukup besar, khususnya yang mencakup perikanan kolam, karamba dan jaring apung. Namun jumlah rumah tangga perikanan (RTP) di Kota Banjarbaru masih cukup terbatas, menurut data tahun 2006 hanya sekitar 248 rumah tangga dengan sebagian besar rumah tangga mengusahakan kolam.

Tabel II.23
Jumlah Luas Areal Potensi dan Produksi Perikanan Tahun 2005

Jenis Areal	Luas Areal Potensi (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Sungai	90	0
Danau	29	0
Kolam	54	180,74
Karamba	57	1,50
Sawah/Mina Padi	64	0
Jaring Apung	0	67,88

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

Tabel II.24
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2005

[illegible]	Jumlah Rumah Tangga
Perairan Umum	50
Kolam	119
Keramba	25
Mina Padi	20
Jaring Apung	22
Pembenihan	13
Total	249

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya yang meningkat, baik secara nilai, kontribusi, maupun pertumbuhannya di Kota Banjarbaru didominasi oleh produk peternak jenis unggas, terutama ayam potong. Selain unggas, jenis ternak yang cukup banyak populasinya di Kota Banjarbaru pada Tahun 2005 adalah kambing, sapi dan babi. Tabel II.27 merinci populasi ternak, baik besar maupun kecil di Kota Banjarbaru pada Tahun 2005.

Tabel II.25
Populasi Ternak Besar dan Kecil Tahun 2005

[illegible] Ternak	[illegible] Kota
Kerbau	35
Sapi	4.419
Kambing	2.967
Babi	282
Unggas:	
a. Ayam Buras	416.394
b. Ayam Potong	2.963.840
c. Ayam Petelur	143.603
d. Puyuh	146.800
e. Angsa	665
f. Itik	9.146

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

Sub sektor perkebunan di Kota Banjarbaru, berdasarkan luas lahannya, didominasi oleh karet dan kelapa dalam/rakyat. Produk perkebunan yang lain dari wilayah Kota Banjarbaru adalah komoditas karet, kelapa dalam, kelapa hibrida dan kopi. Tabel II.28 merinci luas lahan dan produksi tanaman perkebunan menurut jenis komoditi pada perkebunan rakyat di Kota Banjarbaru pada Tahun 2005. Sementara itu, sub sektor kehutanan yang memiliki nilai dan kontribusi terendah dalam PDRB sektor pertanian Kota Banjarbaru hanya terdiri dari jenis tanaman hutan rakyat, antara lain akasia, galam, jati, sengon, mahoni, dan jenis lain. Sengon merupakan jenis tanaman hutan rakyat yang paling dominan potensi/tegakan hutan rakyat di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009. Rincian jenis tanaman dan potensi/tegakan hutan rakyat tersebut dapat dilihat dalam Tabel II.29

Tabel II.26
Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi pada Perkebunan Rakyat di Kota Banjarbaru tahun 2005

Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Produksi	Satuan Produksi
Karet	447	2.862	Kwintal
Kelapa Dalam/Rakyat	208	1.171.406	Butir
Kelapa Hibrida	38	213.750	Butir
Kopi	32	32	Kwintal

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

Tabel II.27
Potensi/Tegakan Hutan Rakyat

Jenis Tanaman Hutan Rakyat	Jumlah (Pohon)
Akasia	19.182
Galam	10.842
Jati	7.770
Sengon	62.550
Mahoni	39.198
Jenis Lain	125.100

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

3.3. Aspek Daya Saing Daerah

3.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat pada aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya pengeluaran rumah tangga berhubungan erat dengan tingkat konsumsi rumah tangga itu sendiri walaupun dipengaruhi juga oleh beberapa hal yang lain seperti jumlah anggota rumah tangga dan kebiasaan lingkungan tempat tinggal.

Tabel II.28
Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Banjarbaru Tahun 2003 sd 2005

Golongan Pengeluaran	Persentase Rumah Tangga		
	2003	2004	2005
< 900.000	54,77	49,77	45,56
900.001 - 1.450.000	26,33	38,99	32,57
>1.450.000	18,89	11,24	21,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2003-2005

Tabel di atas menunjukkan rumah tangga mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari atau sama dengan Rp.900.000 perbulan menurun dari sebesar 54,77 persen pada tahun 2003 menjadi 45,56 persen pada tahun 2005. Demikian pula dengan yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 900.001,00 sampai dengan Rp. 1.450.000,00 tercatat, hal ini berarti tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Banjarbaru meningkat dilihat dari tingkat konsumsi pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran komoditi dari bahan makanan terjadi pada jenis makanan dan minuman, ikan, tembakau, sirih dan padi-padian. Sedangkan pada komoditi non makanan lebih banyak terjadi pada jenis perumahan dan fasilitas rumah tangga.

3.3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi jalan yang memadai dan aman untuk transportasi mutlak diperlukan oleh berbagai pihak baik untuk kelancaran pembangunan itu sendiri maupun untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tabel II.29
Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Jalan Tahun 2001 sd 2005 (km)

Kondisi Jalan	2001	2002	2003	2004	2005
Baik	86,837	128,106	168,766	226,125	257,421
Sedang	182,437	207,091	218,828	207,655	196,769
Sedang/Rusak	-	44,559	-	-	-
Rusak	73,800	68,685	97,037	59,145	42,744
Rusak Berat	16,965	30,994	19,617	14,309	11,683
Jumlah	354,039	479,435	504,248	507,234	508,557

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Panjang jalan negara yang melewati Kota Banjarbaru hingga tahun 2005 adalah 26,5 km dengan kondisi baik. Sedangkan jalan Provinsi yang ada di Kota Banjarbaru adalah sepanjang 19 km, dengan 100 persen dalam kondisi baik. Jalan yang dimiliki pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2005 adalah sepanjang 508,557 km dengan rincian 50,26 persen dalam kondisi baik, 38,69 persen dalam kondisi sedang, 8,40 persen dalam kondisi rusak dan 2,30 persen dalam kondisi rusak berat.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru membawa konsekuensi semakin bertambahnya jumlah angkutan darat sebagai sarana transportasi bagi penduduk. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru.

Tabel II.30
Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pendaftaraan Ulang dan Pendaftaran Baru Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2002 sd 2005

Kendaraan/Tahun	2002	2003	2004	2005
Sepeda Motor	17.966	18.568	22.473	26.996
Scoter	-	-	605	549
Mini Bus/Micro Bus	1.610	1.531	1.699	1.937
Bus	-	-	7	5
Pick Up	1.370	855	934	1.044
Sedan	533	526	538	525
Jeep	664	646	578	635
Truck	-	659	596	776

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarbaru dari tahun 2002 hingga tahun 2005 meningkat cukup tajam. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Banjarbaru mencatat bahwa jumlah kendaraan roda dua jenis sepeda motor meningkat 70 persen

dibanding tahun 2002 sedangkan jumlah kendaran bermotor roda 4 bertambah sebanyak 18 persen. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor membawa dampak semakin padatnya jalan raya serta semakin meningkatnya polusi udara akibat pembakaran bahan bakar. Jika dibandingkan dengan panjang jalan, maka pada tahun 2005 rasio panjang jalan dengan kendaraan roda 2 adalah 1: 54 sedangkan rasio panjang jalan dengan kendaraan roda 4 adalah 1 : 10

Kota Banjarbaru merupakan pintu gerbang utama untuk mengakses seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan di kota ini terdapat Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor. Keberadaan bandara ini memudahkan akses ekonomi, sosial serta pendidikan di Kota Banjarbaru sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.31
Jumlah Penumpang yang Datang ke dan Berangkat Dari Bandara Syamsudin Noor
Tahun 2001 sd 2005

Tahun	Datang	Berangkat
2001	189.260	195.601
2002	238.504	245.635
2003	380.375	395.061
2004	608.704	633.921
2005	652.549	680.822

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor dan penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2001, jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 245 persen sedangkan penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 248 persen.

Peningkatan kemampuan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mampu mendorong dan menumbuhkembangkan investasi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri yang ramah lingkungan dengan dilandasi ekonomi kerakyatan merupakan salah satu misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi Kota Banjarbaru. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketersediaan fasilitas akomodasi di suatu wilayah akan mendukung iklim pariwisata serta menarik investor untuk masuk ke wilayah tersebut.

Sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005 telah terjadi peningkatan fasilitas akomodasi yaitu dari 15 hotel/penginapan dengan 305 kamar pada tahun 2001 menjadi 20 hotel/penginapan dengan 387 kamar pada tahun 2005.

Tabel II.32
Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan serta Jumlah Kamar di Kota Banjarbaru
Tahun 2001 sd 2005

Tahun	Jml. Penginapan	Jumlah Kamar
2001	15	305
2002	16	307
2003	19	380
2004	20	387
2005	20	387

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Air merupakan salah satu sumber utama dalam kehidupan masyarakat. Air merupakan faktor pendukung untuk menjaga kelangsungan pembangunan. Semakin banyak rumah tangga yang mampu mengakses air bersih menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk menyediaan air bersih yang terjangkau bagi warganya. Ketersediaan air bersih juga merupakan daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kota Banjarbaru.

Data yang diperoleh dari PDAM Intan Banjar menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi air bersih sebesar 3,14 juta m^3 dari tahun 2001 dari sebesar 4,35 juta m^3 menjadi 7,48 juta m^3 pada tahun 2005. Dari air bersih yang diproduksi sebesar 7,48 juta m^3 sekitar 7,12 juta m3 telah didistribusikan, namun yang terjual hanya 4,70 juta m^3 saja. 2,45 juta m^3 sisanya telah susut atau hilang. Jumlah air bersih yang diproduksi dan didistribusi kan tersebut masih termasuk untuk Kabupaten Banjar, karena merupakan satu sistem pengolahan dan pendistribusian. Jumlah pelanggan air minum di Kota Banjarbaru mencapai 10.094 pelanggan rumah tangga dengan rincian di Kecamatan Landasan Ulin ada 560 pelanggan rumah tangga, Cempaka 189 dan Banjarbaru 9.345 pelanggan.

Tabel II.33
Jumlah Pelanggan Air Minum Dirinci Setiap Kecamatan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landasan Ulin	288	327	368	560	560
Cempaka	199	209	196	189	189
Banjarbaru	7.779	8.281	7.680	9.345	9.345
Jumlah	8.266	8.817	8.244	10.094	10.094

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Pelanggan listrik yang tercatat pada PT.PLN Ranting Banjarbaru berjumlah 48.784 dengan berbagai jenis tarif seperti terlihat pada tabel 6.2.1. KWH terjual sebanyak 91.429.762 dengan nilai mencapai 57,75 milyar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari beberapa jenis pelanggan yaitu 28,89 milyar rupiah dari pelanggan rumah tangga, 10,87 milyar rupiah dari pelanggan usaha, 9,67 milyar rupiah dari industri, 1,33 milyar rupiah dari pelanggan sosial, 6,68 milyar dari Kantor dan PJU dan 307,49 juta rupiah dari pelanggan lain-lain (PS dan TS)

3.3.3. Iklim Berinvestasi

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi iklim untuk berinvestasi adalah perlindungan atau jaminan keamanan. Kota Banjarbaru dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang sangat pesat juga mempunyai permasalahan dalam bidang keamanan. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Tabel II.34
Banyaknya Peristiwa Kejahatan Tahun 2001-2005

Tahun	Jumlah Peristiwa
2001	-
2002	494
2003	386
2004	516
2005	516
Jumlah	516

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah banyak terjadi beberapa peristiwa kejahatan sebagai dampak sosial dari semakin berkembangnya Kota Banjarbaru. Berdasarkan data dari Polresta Kota Banjarbaru yang dilaporkan oleh BPS Kota Banjarbaru dalam Banjarbaru Dalam Angka beberapa tahun terakhir, peristiwa tindak kejahatan di dominasi oleh curat, curanmor, curbis, penggelapan, narkoba dan penipuan.

Pembangunan di bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatan penerimaan daerah.

Tabel II.35
Nama dan Alamat Objek Wisata Yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2005

Nama Objek Wisata	Alamat
1. Taman Chandra Kirana	Jl . A.Yani Km 28
2. Kolam Renang Idaman	Jl. Taman Gembira Barat
3. Lapangan Golf Swargaloka	Jl. A. Yani Km. 27
4. Taman Idaman	Jl. A. Yani Km. 34
5. Taman Air Mancur Mingguraya	Jl. A.Yani Km. 34
6. Warung Minggu Raya	Jl. A.Yani Km. 34
7. Sirkuit Sungai Ulin	Jl. PM. Noor Sei Ulin
8. Pendulangan Intan Cempaka & Pumpung	Sungai Tiung Cempaka
9. Wisata Perikanan	Jl. Mentaos Timur
10. Hutan Pinus	Jl. Mentaos Timur
11. Museum Lambung Mangkurat	Jl. A.Yani Km 34

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, 2005/2006

3.3.4. Sumber Daya Manusia

Disadari atau tidak pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin besar persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan Tabel II.36 terlihat bahwa adanya penduduk Kota Banjarbaru yang berusia 5 tahun keatas sepanjang tahun yang terbanyak adalah yang memiliki ijazah SLTA yang untuk tahun 2005 mencapai 26,40 persen, kemudian yang tidak punya ijazah atau masih belum sekolah 28,53 persen. Yang menamatkan SD sebesar 17,20 persen , SLTP sederajat 15,92 persen, DI/III 2,95 persen, dan yang tamat tingkat S1 atau lebih sebesar 8,99 persen.

Tabel II.36
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB yang dimiliki di Kota Banjarbaru Tahun 2002-2005

Tdk/Blm tamat SD	22,63	27,83	29,36	28,53
SD	21,32	22,38	18,29	17,20
SLTP	17,16	15,16	15,26	15,92
SLTA	29,77	25,28	25,28	26,40
DI/DII/DIII	37,75	2,43	2,26	2,95
DIV/S-1/S-2/S-3	5,36	6,91	6,24	8,99

Sumber : BPS, Susenas 2002-2005

Bila dilihat dari usia produktif maka penduduk Kota Banjarbaru dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok usia belum produktif (<15 thn), kelompok usia produktif (15-64 thn) dan usia lanjut (>65 thn).

Berdasarkan kelompok umur ini maka dapat dihitung besarnya Ratio Ketergantungan *(Depedency Ratio)* Angka ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (<15 tahun) dan kelompok usia tua (>65 tahun). Angka ketergantungan di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun memperlihatkan angka yang turun naik. Untuk tahun 2005 adalah sebesar 43,27 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43 penduduk usia tidak produktif, yaitu masing-masing untuk usia muda sebesar 40 jiwa dan usia tua 3 jiwa. Kenyataan ini sekaligus merupakan warning bagi pemerintah Kota Banjarbaru untuk segera mengantisipasi secara dini karena pada tahun-tahun mendatang usia muda ini memerlukan sarana pendidikan yang memadai serta bagi sebagian golongan usia muda ini ada yang memasuki usia produktif sehingga memerlukan lapangan pekerjaan dan buka tidak mungkin akan menambah jumlah pengangguran sehingga pada akhirnya bias terjadi kerawanan sosial.

Tabel II.37
Angka Ketergantungan menurut Jenis Kelamin Kota Banjarbaru
Tahun 2001 sd 2005

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2002	21,38	21,33	42,71
2003	25,46	21,62	47,08
2004	23,04	21,07	44,12
2005	22,60	20,67	43,27

Sumber : BPS, Susenas 2002-2005

BAB. III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Penduduk merupakan salah satu faktor produksi dan modal dasar pembangunan. Faktor produksi ini akan menjadi sangat efektif jika ditunjang oleh komposisi, distribusi dan kualitas yang baik. Penduduk bahkan dapat menjadi masalah jika tidak terkendali diiringi dengan kualitas, komposisi dan distribusi yang seimbang.

Dalam 20 tahun mendatang, Kota Banjarbaru akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 171.496 orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 276.572 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang terutama mengantisipasi adanya migrasi penduduk dikarenakan letak Kota Banjarbaru yang sangat strategis dan pemindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Produktivitas dan daya saing perekonomian daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia daerah. Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing perekonomian daerah, oleh karenanya pembangunan pendidikan dan kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terkait dengan pembangunan pendidikan, akses masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2005 capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD 94,89%, SLTP 76,39%, dan SLTA 60,63%. Demikian pula halnya dalam bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan masih rendah yang diindikasikan dengan masih rendahnya rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan, penyakit menular, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja seiring dengan bertambahnya jumla penduduk pada tahun 2025 yang adalah merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar di masa mendatang.

Masih terbatasnya penyediaan ruang gerak untuk mengekspresikan idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik disebabkan oleh karena belum optimalnya pembinaan pemuda. Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasa perlu mengembangkan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga. Oleh karena itu, pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk

mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Sementara itu, permasalahan dalam pembangunan bidang sosial adalah beragam dan meningkatnya beban permasalahan kesejahteraan sosial akibat terjadinya berbagai krisis sosial.

Permasalahan bidang kebudayaan terkait dengan adanya imbas perubahan global yang berpotensi menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai tradisional dengan pengaruh global. Hal ini dapat mengancam kelestarian nilai-nilai budaya. Permasalahan lainnya adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya yang dapat menimbulkan krisis jati diri dan berakibat timbulnya konflik sosial dan disintegrasi.

Pembangunan bidang kehidupan beragama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

b. Ekonomi

Meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, pembangunan ekonomi saat ini masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Pasca krisis tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru menunjukkan kecenderungan meningkat. Sampai dengan tahun 2005, pertumbuhan tersebut berasal dari sektor utama yaitu sektor lembaga keuangan, bangunan, listrik, perdagangan, angkutan dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5% namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Sektor perdagangan merupakan komponen utama pembangunan daerah yang berkontribusi kepada PDRB sebesar 21,54%, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 17,06%, jasa sebesar 16,84% serta industri pengolahan sebesar 15,14%. Dengan ketergantungan bahan baku dari luar, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, serta rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri daya saing industri di Kota Banjarbaru masih rendah.

Secara umum, pertanian di Kota Banjarbaru memiliki potensi yang besar untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya optimal.

Kota Banjarbaru memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan, dengan keragaman budaya yang dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Peringkat sektor pariwisata Kota Banjarbaru se Kalimantan Selatan berada pada posisi ke-4 setelah Banjarmasin, Hulu Sungai Selatan dan Kota Baru. Namun demikian, kendala yang masih dihadapi adalah belum tertatanya obyek dan daerah tujuan wisata serta masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukungnya.

Iklim investasi di Kota Banjarbaru menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Letak yang sangat dengan laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan penduduk Provinsi menempatkan Kota Banjarbaru menjadi tujuan utama untuk investasi. Namun demikian, pertumbuhan investasi yang ada masih rendah yang disebabkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur pendukung. Di lain pihak pertumbuhan investasi tersebut, belum memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi lokal karena lebih berorientasi pada bahan baku yang didatangkan dari luar.

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, peranan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) masih perlu dikembangkan dalam perekonomian daerah. Permodalan, sumberdaya manusia, dan pemasaran masih menjadi kendala. Rendahnya aktivitas sektor riil yang disebabkan oleh tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi menghambat konstribusi KUKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Dalam meningkatkan daya saing daerah, kemampuan dalam menguasai dan memanfaatkan IPTEK sangat diperlukan. Penguasaan IPTEK yang ditunjukkan dengan adanya publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Kota Banjarbaru belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini karena mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan pengguna belum efektif. Lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya pemanfaatan IPTEK serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan riil masyarakat menyebabkan kegiatan IPTEK belum dapat memberikan hasil yang signifikan.

d. Infrastruktur Wilayah

Pada 20 tahun kedepan, sarana dan prasarana wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Transportasi yang terdiri dari transportasi darat, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan kab/kota; belum optimalnya kemantapan jalan kab/kota terutama di jalur jalan vertikal yang menghubungkan antar wilayah di Kota Banjarbaru; masih kurangnya pembangunan; rendahnya kapasitas ruas jalan di perkotaan; kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan terutama di kawasan perkotaan; belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda.

Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan; masih terbatasnya penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas penanaman padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi.

Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti, perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni. Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal baik.

Kebutuhan masyarakat akan pemenuhan fasilitas pelayanan dasar masih cukup tinggi dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan penduduk sementara kapasitas yang ada masih terbatas, Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang ada antara lain transportasi, air bersih, listrik dan komunikasi serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah klasik daerah dalam pembangunan daerah, Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan yang dilakukan masih berorientasi pada basis satuan wilayah administratif, yang merupakan basis kewenangan pemerintahan atau pengelolaan pembangunan, sebagai contoh adanya pemekaran wilayah kecamatan dan desa sebagai strategi pemerataan pelayanan dan pembangunan, Pendekatan pembangunan pada satuan wilayah ekologi, ekonomi dan permukiman masih belum mendapat porsi yang memuaskan, pola pemanfaatan ruang yang ada berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih belum effektif sepenuhnya dilaksanakan bahkan cenderung terjadi overlapping antar fungsi peruntukan lahan. Ego sektoral dalam pemanfaatan ruang masih terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tantangan kedepan dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana menselaraskan dan mengharmonisakan asas-asas pembangunan seperti keberlanjutan (*sustainability*), keadilan (*fairness*), keseimbangan (*equality*) dan pertumbuhan (*growth*). Artinya faktor ekonomi, lingkungan dan manusia menjadi faktor utama yang harus dirumuskan kembali mana yang di depan dan mana yang mendukung sehingga ketiga-tiganya berjalan harmonis.

e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan Kota Banjarbaru. Namun demikian, peran penting ini belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup Kota Banjarbaru berada pada tingkat cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari fenomena ini diantaranya adalah semakin berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan munculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta konflik pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir.

Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya, kerusakan dan berkurangnya luasan kawasan yang dilindungi, pencemaran udara perkotaan, pengrusakan dan kebakaran lahan, pencemaran dan sedimentasi sungai, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan sumber daya air yang kurang terkendali, hal tersebut diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan serta rendahnya pemahaman resiko bencana, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Upaya pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu menahan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi.

Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk

bagi kehidupan masyarakat.

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antar pihak atau antar daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal.

f. Politik

Upaya mendorong demokrasi dilakukan pula dengan mengubah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilakukan pada 2004, sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung. Dengan demikian secara kelembagaan dan prosedur, Indonesia telah memasuki tahap demokrasi yang sangat kuat. Di Kota Banjarbaru pemilihan kepala daerah secara langsung telah berjalan dengan baik dengan ditandai oleh kesiapan elite dan masyarakat untuk menerima kekalahan atau kemenangan pihak lain. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat telah siap dan percaya dengan aturan main dalam berdemokrasi.

Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian di satu sisi masih terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih yang cenderung menurun perkembangan prosentasenya. Hal tersebut disebabkan oleh terlalu banyaknya frekuensi pelaksanaan pemilihan umum yang melibatkan masyarakat pemilih serta memakan waktu yang berlarut-larut.

g. Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Hukum terkendala pada proses demokratisasi yang mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam implementasinya. Sampai dengan 2006 masih banyak peraturan daerah yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

h. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya terkait dengan kondisi politik dan hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Banjarbaru merupakan daerah yang direncanakan akan menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan lintasan yang menghubungkan beberapa wilayah. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen, terdapatnya obyek vital, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri serta banyaknya permasalahan kepemilikan lahan. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada pertikaian seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara dan Daerah.

i. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam mewujudkan proporsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas wilayah. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan lahan terbangun yang cenderung acak dan menyebar, serta degradasi lingkungan di wilayah tertentu merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan. Pemeliharaan dan pengamanan terhadap wilayah kawasan lindung (hutan lindung) yang menjadi milik negara seluas 1.383 Ha yang berada di kawasan Landasan Ulin dan Liang Anggang patut menjadi perhatian berbagai pihak dikarenakan banyaknya konflik kepentingan dari berbagai pihak. Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi permukiman dan industri merupakan permasalahan dalam upaya pengendalian tata ruang.

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Kota Banjarbaru sampai saat ini masih timpang. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Kota Banjarbaru, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Kota Banjarbaru yang seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan.

Permasalahan lain adalah terbatasnya penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman dan pemenuhan sarana dan prasarananya terutama di kawasan perkotaan. Luasan lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan keberadaannya.

j. Aparatur

Penataan sistem untuk lebih memudahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengalami kendala, karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Penetapan standar pelayanan minimal untuk beberapa bidang sudah dapat diimpelementasikan meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dapat dilakukan. Untuk reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Transisi dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi yang ideal. Kultur tradisional dan primordial masih mewarnai birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru walaupun dari sisi sarana dan prasarana telah cukup modern, namun dukungan teknologi komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal lainnya adalah masih rendahnya pemahaman dan keterampilan aparatur berkaitan dengan media komunikasi modern.

Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi sarana dan prasarana aparatur sudah cukup baik dengan gedung kantor yang layak dan seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki gedung tersendiri. Namun sarana dan prasarana yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, seperti unit pengelola teknis daerah dalam pemungutan pajak daerah, dan unit perijinan. Terlebih lagi standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap alur kegiatan administrasi pemerintahan belum dapat diimplementasikan oleh seluruh aparatur secara baik.

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.

k. Keuangan Daerah

Adanya kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah potensi dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat dikarenakan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai faktor pengurang relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sementara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) cenderung meningkat, semakin senjangnya fiskal daerah tersebut berdampak pada pembiayaan pembangunan yang semakin terbatas atau ruang gerak pembangunan juga semakin terbatas. Ratio Kemandirian daerah yang sangat kecil menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah masih sangat tinggi terhadap kebijakan desentralisasi fiskal.

Anggaran pemerintah belum sepenuhnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, perangkat dan lembaga keuangan di daerah masih terbatas dengan tantangan kedepan adalah daerah tidak dapat selamanya mengandalkan sumber-sumber

dana pembangunan dari besarnya keuangan pemerintah saja dan keuangan pemerintah daerah sendiri tidak hanya mengandalkan dari dana perimbangan saja. Disisi lain schedule transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah yang tidak teratur dan tidak pernah sejalan dengan kalender anggaran di daerah mengakibatkan mekanisme transfer keuangan di daerah jadi kurang lancar sehingga menimbulkan produktifitas yang menurun, krisis ekonomi yang ditandai dengan lajunya tingkat inflasi secara nasional merupakan ancaman dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3.1 Isu Strategis

Melihat permasalahan di atas, tanpa mengeyampingkan isu-isu strategis lainnya maka isu strategis yang paling utama dan perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam 20 tahun mendatang di Kota Banjarbaru adalah adanya bertambahnya jumlah penduduk dan persebarannya. Dengan adanya isu strategis utama tersebut maka tentunya isu-isu strategis lainnya perlu juga untuk ditangani, yaitu :

1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah social;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
7. Kualitas pelayanan public;
8. Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
9. Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

BAB. IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2005 -2025 adalah :

TERWUJUDNYA BANJARBARU
SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN

Empat dimensi Kota Banjarbaru tersebut terdiri dari :

a) Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan

b) Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan

c) Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman

d) Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan

Penjelasan Visi Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Kota Banjarbaru yang mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Memiliki keunggulan untuk mewadahi kegiatan usaha jasa serta pedagangan yang menjadikannya daya tarik bagi pelaku usaha dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal serta tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan sosial dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi dan kemandirian dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

Adapun makna dari setiap kata visi adalah sebagai berikut :

1. **Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan**. Kota Banjarbaru sebagai kota yang bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terampil dengan disertai nilai-nilai agama dan budaya leluhur. Kreatifitas dan ketrampilan penduduk kota Banjarbaru menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.
2. **Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan**. Sebagai sebuah kota yang akan banyak menyandarkan perekonomiannya pada pergerakan barang dan terutama jasa, maka peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ekonomi sangat diperlukan, kualitas jalan yang bagus dan angkutan yang layak misalnya Kota Banjarbaru menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan dengan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah dan dan Kalimantan Timur adalah sebuah keuntungan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan. Dalam pembangunan kota, pengembangannya lebih banyak diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar pada barang dan jasa. Iklim usaha juga menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor industri di Kota Banjarbaru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
3. **Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman**. Perkembangan kota Banjarbaru telah menyebabkan peningkatan permintaan perumahan bagi penduduk. Implikasinya, peranan tata ruang kota dan kepastian hukum bagi status kepemilikan lahan menjadi

sangat penting sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen kota (*urban sprawl*) di masa depan. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representatif dan berwawasan lingkungan serta adanya kepastian hukum bagi kepemilikan lahan menjadi agenda jangka panjang pembangunan Kota Banjarbaru.

4. **Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan**. Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kota pelayanan publik harus bertumpu pada *good governance*/tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial.

Tujuan dari visi adalah meletakkan pondasi dasar dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai penggerak berputarnya roda perekonomian serta kemajuan masyarakat serta bidang-bidang lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mengurangi jumlah kemiskinan. Lalu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa akan semakin mudah terpenuhi serta akses pada barang dan jasa publik akan semakin mudah seperti kesehatan dan pendidikan sehingga meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.

4.2. MISI

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru tersebut akan dicapai melalui misi pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas;** ditandai oleh kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;** ditandai oleh kemampuan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan, penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehingga tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada penduduk yang tidak/kurang mampu, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
3. **Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga kesimbangan pemanfaatan ruang;** ditandai oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya.
4. **Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;** ditandai oleh kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan dalam matrik berikut :

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	
Visi	Misi
Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan	**Misi Satu**, Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas; ditandai oleh kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan	**Misi Dua**, Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah; ditandai oleh kemampuan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan, penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehingga tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada penduduk yang tidak/kurang mampu, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek
Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman	**Misi Tiga**, Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari; ditandai oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan

	pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya.
Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan	**Misi Empat**, Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik; ditandai oleh kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Misi Satu didasari oleh prediksi jumlah penduduk Banjarbaru dalam dua puluh tahun mendatang diperkirakan sekitar 276.572 jiwa dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Jumlah penduduk yang besar harus dilihat sebagai hal yang positif karena merupakan kekuatan dan sebagai aset pembangunan nasional terutama bila besarnya penduduk tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Besarnya penduduk ini tentunya akan berimplikasi pada perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta ketersediaan lapangan kerja.

Misi Dua didasari oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Banjarbaru tahun 2005-2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 6% sampai 8% per tahun dan struktur ekonomi Kota Banjarbaru ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor perdagangan, sektor bangunan, sektor jasa dan sektor industri pengolahan. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Misi Tiga didasari oleh tantangan besar yang dihadapi Kota Banjarbaru sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Misi Empat didasari oleh tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 yaitu kinerja aparatur, kualitas SDM aparatur, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik perlu diwujudkan terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/efisiensi yudisial.

1.3. *TUJUAN DAN SASARAN*

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1.3.1. TUJUAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah :

1. Masyarakat/SDM yang berkualitas;
2. Menumbuh kembangkan ekonomi daerah;
3. Lingkungan yang sehat dan dinamis;
4. Pemerintahan yang baik.

1.3.2. SASARAN

Sebagai ukuran tercapainya visi dan misi jangka panjang tersebut serta mengacu pada tujuan yang diusulkan, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sesuai sasaran pembangunan bidang/sektor-sektor pembangunan yang berpijak pada isu-isu strategis, yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat/SDM yang berkualitas
2. Terwujudnya sistem dan iklim daerah yang aman, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan penguasaan IPTEK dan memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi lokal terutama sektor ekonomi basis dengan bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing
3. Terwujudnya pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga kesimbangan pemanfaatan ruang.
4. Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan.

BAB. V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

1. Misi 1, Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas.

a. Sasaran Pokok

1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dibidang pendidikan dan kesehatan
2) Mewujudkan masyarakat yang sehat, berperilaku cerdas, agamis dan berbudi pekerti luhur, serta menguasai IPTEK.

b. Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan SDM yang berkualitas dan handal, maka hal ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan dan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan SDM. Kemudahan masyarakat mengakses pendidikan dan kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan merupakan syarat penting bagi peningkatan kualitas SDM. Tolak ukur yang mudah untuk menilai keberhasilan peningkatan SDM adalah meningkatnya Indeks Pembagunan Manusia (IPM). Karena itu, dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan diarahkan pada :

Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada :

1). Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal dengan memperhatikan kondisi wilayah;
2). Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
3). Pengembangan fungsi, peran dan kualitas aparatur institusi pendidikan yang berskala nasional, regional, dan internasional yang dikembangkan melalui pusat-pusat pelatihan;
4). Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;
5). Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata, peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasilnya, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
6). Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta dengan standar yang memadai, disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
7). Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
8). Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat

mengembangkan potensi dirinya;

9). Pemenuhan tuntutan anggaran dan pembiayaan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan kepada :

1). Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi masyarakat yang tidak/kurang mampu;
2). Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok penduduk;
3). Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik;
4). Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.

Pembangunan keagamaan merupakan landasan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Karakteristik masyarakat Kota Banjarbaru yang religius dan berbudaya diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan pada :

1). Peningkatan pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama melalui pendidikan agama dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan umat semakin meningkat;
2). Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial;
3). Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan internal umat beragama dan kerukunan antarumat beragama;
4). Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;
5). Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antarumat beragama pada proses pembangunan.

Pembangunan kebudayaan juga merupakan modal bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan terwujudnya masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya, diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan.

Pembangunan di bidang kebudayaan diarahkan pada :

1). Pemantapan ketahanan budaya masyarakat;
2). Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat;
3). Pemantapan serta penguatan identitas dan jatidiri masyarakat;
4). Penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan masyarakat pembelajar.

Pembangunan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal lainnya memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada :

1). Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja;
2). Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, jasa serta sektor pertanian;
3). Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal;
4). Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.

Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM diselenggarakan untuk memberikan dukungan nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi.

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada :

1). Peningkatan kualitas pemuda agar menjadi modal manusia yang memiliki karakter dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK;
2). Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan dan bagi kesejahteraan masyarakat;
3). Peningkatan kualitas dan aktivitas olahraga yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olah raga prestasi.

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada :

1). Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan;
2). Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3). Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan jender;
4). Ketersediaan data dan statistik.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mendukung semua hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga masyarkat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan pada :

1). Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat;
2). Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), diarahkan untuk:

1). Memantapkan penguasaan dan pengambangan IPTEK yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
2). Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan pengembangan teknologi pada setiap aspek pembangunan guna perwujudan masyarakat sejahtera.

2. **Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;**

a. **Sasaran Pokok misi dua adalah;**

1) Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja dan pengurangan penduduk miskin
2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, meningkatnya daya beli masyarakat, enyerapan angkatan kerja dan pemerataan pendapatan

b. **Arah Kebijakan misi dua adalah;**

Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Kota Banjarbaru tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pertanian, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), pengembangan dunia usaha, investasi, pembangunan energi, infrastruktur wilayah, dan keuangan daerah.

Pengembangan di bidang pertanian diarahkan pada :

1). Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, dan waktu sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir;
2). Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen;
3). Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer;
4). Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;
5). Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu sistem pertanian dan bisnis kelautan;
6). Pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang menggambarkan harmoni antarpelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah terkait, produsen dan pelaku jasa pertanian dalam lingkup wilayah dan lingkup fungsional.

Pengembangan industri manufaktur diarahkan pada :

1). Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk hasil penelitan dan pengembangan, pendalaman struktur, penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendukungan infrastruktur industri;
2). Pembangunan industri yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan industri ramah lingkungan serta pengembangan industri berbahan baku yang terbarukan;
3). Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional;
4). Pengembangan industri substitusi impor, industri yang potensial dan industri kreatif.

Selanjutnya untuk pengembangan jasa difokuskan pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diarahkan pada:

1). Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;
2). Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
3). Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri;
4). Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan unggulan dan pembentukan ikon Kota Banjarbaru. Peningkatan citra Kota Banjarbaru sebagai daerah tujuan wisata diarahkan untuk dapat mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Kota Banjarbaru diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.

Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi lokal serta perumusan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi.

Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepatan pemberian izin usaha. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Pembangunan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi terbarukan seperti, potensi hidro, surya dan angin.

Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif dan efisien, yang diarahkan pada peningkatan pergerakan orang dan barang, melalui kualitas pelayanan dan optimalisasi biaya, mempercepat dan memperlancar pergerakan melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda, angkutan umum massal terutama di perkotaan, pengembangan jalan bebas hambatan di perkotaan dan antar kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama serta peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan primer. Pembangunan transportasi udara dan laut dilakukan melalui pembangunan dan revitalisasi bandara serta pelabuhan nasional maupun internasional, guna memenuhi kebutuhan pergerakan dari dan ke Kota Banjarbaru dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

Pengembangan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui upaya konservasi, sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air, peningkatan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan. Adapun pengembangan infrastruktur irigasi diarahkan pada peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi penyediaan air irigasi dan kehandalan prasarana irigasi untuk menciptakan keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah.

Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah, pengolahan air bersih, dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/kelompok masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Pengembangan sarana perumahan diarahkan pada pembangunan rumah-rumah susun terutama di kawasan perkotaan.

3. **Misi 3, Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang**

   a. **Sasaran Pokok**

      1) Terwujudnya pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang
      2) Terwujudnya wilayah permukiman yang representatif dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
      3) Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, aksessable dan berwawasan lingkungan

   b. **Arah Kebijakan**

      Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya dilakukan dengan pertimbangan menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertambahan penduduk alami maupun arus migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan.

      Pembangunan kependudukan diarahkan untuk :

      1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui upaya :
         a. memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentasn, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi PUS tentang kesehatan reproduksi, melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan

pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.

b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;

c. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan

d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

2. Menata pembangunan kependudukan melalui:

a. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi;

b. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air minum dan sanitasi diarahkan pada peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitasi, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat, penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang akuntabel dan profesional serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi.

Lingkungan hidup yang asri dan lestari akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang termaju, daya dukung lingkungan memegang peran penting dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinergitas implementasi di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan aspek penting untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan memerlukan suatu perhatian. Keteladanan sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Banjarbaru mendapat perhatian khusus agar berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat berperilaku ramah lingkungan dapat tercapai.

Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R, yaitu *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (pemakaian ulang), *Recycle* (daur ulang). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktural dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabel, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif.

Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah, tsunami, dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan/imbuhan air tanah, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Kawasan lindung Kota Banjarbaru memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan bermanfaat besar guna mencegah atau mengurangi besaran serta dampak akibat bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kawasan lindung juga mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan secara

ekonomi dari sisi jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, atau sumber daya air. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya harus tetap dalam kaidah konservasi yang telah ditentukan.

Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya, menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambahnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap upaya pengembangan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi, pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dalam pengembangan pengelolaan wilayah, kepariwisataan dan pendidikan, pengelolaan sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dan produk pertambangan, peningkatan pencadangan energi atau sumber daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembatasan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab.

4. **Misi 4, Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;**

   a. **Sasaran Pokok**

      1) Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan

      2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

   b. **Arah Kebijakan**

      Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalitas, peraturan, sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif.

      Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dicapai melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan untuk berperan sesuai fungsinya masing- masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik,

rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, juga semakin kuatnya peran masyarakat madani dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Demokrasi diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa yang menjamin pertisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui :

1). Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
2). Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik;
3). Penguatan peran masyarakat madani dalam demokratisasi;
4). Perluasan akses partisipasi publik;
5). Pengembangan budaya politik kewargaan;
6). Penataan daerah otonom kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali;
7). Pengembangan kerja sama daerah.

Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masya rakat dia rahkan untuk mewujudkan tertib sosial berlandasan hukum. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Kota Banjarbaru. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen.

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1). Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;
2). Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3). Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.

Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas legislasi daerah. Produk hukum yang ditetapkan harus diikuti dengan penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

1). Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;
2). Perwujudan harmonisasi produk hukum;
3). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
4). Pembangunan budaya hukum;
5). Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

1). Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi serta kesejahteraan aparatur;
2). Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan;
3). Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;
4). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5). Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing;
6). Peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, merupakan komitmen bersama dalam perwujudannya antara pemerintahan Kota Banjarbaru, peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru serta dukungan yang kuat dari pemerintah. Bentuk komitmen tersebut diimplementasikan ke dalam kerangka anggaran (APBD Kota Banjarbaru dan Non APBD serta dana masyarakat/dunia usaha) dan kerangka regulasi.

Tahapan pembangunan jangka panjang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005-2010)

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Lima Tahun Pertama adalah peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini adalah:

a. **Bidang Pendidikan**. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional menjadi prioritas pada periode ini. Pemberantasan buta aksara juga menjadi target yang tak kalah pentingnya, melalui pengembangan pendidikan keaksaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal. Pembangunan bidang kebudayaan di Kota Banjarbaru diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Selanjutnya langkah dan upaya yang

dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Kota Banjarbaru.

b. **Bidang Kesehatan**. Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan, peningkatan pengamtan yang terus menerus penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.

c. **Bidang Keagamaan**. Pembangunan di bidang keagamaan memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama. Langkah dan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.

d. **Bidang Kebudayaan**. Pembangunan bidang kebudayaan di Kota Banjarbaru diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Kota Banjarbaru.

e. **Bidang Ketenagakerjaan**. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja.

f. **Bidang Pemuda dan Olah Raga**. Pembangunan bidang pemuda di Kota Banjarbaru diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang olahraga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga yang berskala daerah, regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi yang ada Kota Banjarbaru. Selain olahraga prestasi, pengembangan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat menjadi prioritas pada RPJP Daerah tahap pertama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah dengan membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara bertahap.

g. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahamanan semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak,

kemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, serta penyediaan data terpilah secara time series pada setiap aspek pembangunan.

h. **Bidang Sosial**. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

i. **Bidang IPTEK**. Pembangunan bidang IPTEK diprioritaskan pada penggalangan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

j. **Bidang Industri dan Perdagangan**. Pembangunan industri di Kota Banjarbaru dilakukan melalui tahapan revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar. Disamping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan Kota Banjarbaru melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, serta perintisan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/*Free Trade Zone* (FTZ).

k. **Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**. Pengembangan pertanian sebagai salah satu core business Kota Banjarbaru ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan sub sistem agribisnis. Strategi penguatan sistem agribisnis Kota Banjarbaru didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribinis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis Kota Banjarbaru diharapkan dapat menghantarkan pertanian pada kondisi ideal sebagai salah satu core business Kota Banjarbaru dan mampu mewujudkan masyarakat Kota Banjarbaru sejahtera.

   Tahapan penguatan sistem agribisnis Kota Banjarbaru disusun meliputi enam aspek penguatan antara lain :

   1). Penguatan sumber daya manusia,
   2). Penguatan usaha,
   3). Penguatan kondisi lingkungan,
   4). Penguatan sarana dan prasarana,
   5). Penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis, dan
   6). Penguatan koordinasi kelembagaan. Pembangunan bisnis pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan pada pembenahan BPP, BBI dan BBTPH, pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah ikan, pembuatan database pertanian, perikanan dan kehutanan, pembuatan tata ruang wilayah budidaya, penegakan hukum dan kebijakan, pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keuangan dan permodalan, teknologi, produksi, pemasaran, pengembangan kemitraan dan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan sarana dan prasarana.

l. **Bidang Kepariwisataan**. Adapun dalam rangka peningkatan citra Kota Banjarbaru sebagai daerah kunjungan wisata, dilakukan upaya penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Banjarbaru, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based development*) serta peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.

m. **Bidang KUMKM**. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya.

n. **Bidang Investasi**. Pada tahapan pembangunan lima tahun pertama ini bidang investasi diarahkan pada penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Kota Banjarbaru. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Kota Banjarbaru sebagai daerah tujuan investasi disegala bidang.

o. **Bidang Energi**. Pada tahap ini penyiapan pranata dalam pengelolaan energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif.

p. **Bidang Infrastruktur Wilayah**. Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi: jalan, angkutan perkotaan, dan jaringan air baku, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi.

q. **Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**. Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Kota Banjarbaru, dilakukan melalui perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi, penataan ruang yang mampu mengarahkan pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah, khususnya kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Provinsi, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah, berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan.

r. **Bidang Kependudukan**. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah.

s. **Bidang Politik**. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif

t. **Bidang Hukum dan HAM**. Dalam bidang hukum dan HAM dilakukan upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

u. **Bidang Ketentraman dan Ketertiban**. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum diarahkan pada upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial, menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya prasyarat pembangunan.

v. **Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik**. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada peningkatan kompetensi dan professionalisme pegawai, penguatan unit-unit pelayanan publik, pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.

w. **Bidang Keuangan Daerah.** Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.

x. **Bidang Tata Ruang**. Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui perwujudan struktur tata ruang Kota Banjarbaru, terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan infrastruktur wilayah.

2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua (2011-2015)

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua ditujukan untuk Peningkatan Aksessibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastrutur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Bidang Pendidikan**. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH), melalui penuntasan penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Pada kurun waktu ini dilakukan akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (pendidikan untuk semua/ *Education For All*). Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap.

Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah perdesaan, daerah perbatasan antar daerah. Selain itu pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal. Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal. Pembangunan sekolah kejuruan tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMA

menjadi 60 : 40. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Peningkatan kepedulian dari pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan terhadap pendidikan pertanian dan peningkatan budaya pertanian perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Adapun dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga riset yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, serta pendampingan perguruan tinggi dalam perwujudan pembangunan daerah.

b. **Bidang Kesehatan**. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui relokasi RSUD Kota Banjarbaru, peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak.

c. **Bidang Keagamaan**. Sedangkan fokus pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat.

d. **Bidang Kebudayaan**. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan yang harmoni dan berbudaya tinggi.

e. **Bidang Ketenagakerjaan**. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan pening katan produktivitas, kualitas dan pening katan kesejahteraan pekerja.

f. **Bidang Pemuda dan Olah Raga**. Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada pemanfaatan Stadion Olah Raga Rudy Risnawan Kota Banjarbaru sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala nasional maupun internasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Adapun pembangunan bidang pemuda diupayakan melalui peningkatan kualitas

pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.

g. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

h. **Bidang Sosial**, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i. **Bidang IPTEK**. Pada tahap ini, bidang IPTEK diarahkan untuk pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkannya dalam mendukung peningkatan kualitas insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (*science*) dan teknologi; perwujudan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi (*cyber city*).

j. **Bidang Industri dan Perdagangan**. Diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Banjarbaru sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar, menata distribusi barang yang efektif dan efisien.

k. **Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**. Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tahap RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pendukung Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian.

   Dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis, upaya yang dilakukan adalah:

   1). Penataan agribisnis yang ada dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang tepat guna menghasilkan produksi pertanian yang tinggi per hektar antara lain dengan menggunakan pendekatan SRI (*System of Rice Intensification*),
   2). Perbaikan subsistem agribisnis,
   3). Revitalisasi agribisnis,
   4). Meningkatkan nilai tambah agribisnis dalam struktur perekonomian, dan
   5). Realokasi sumber daya, pendanaan, dan pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan. Strategi pengembangan bisnis perikan Kota Banjarbaru pada tahap kedua ini diarahkan pada pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha teknologi perikanan, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar.

l. **Bidang Kepariwisataan**. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kota Banjarbaru yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.

m. **Bidang KUMKM**. Pembangunan KUMKM dilakukan melalui melalui optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Banjarbaru. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul.

n. **Bidang Investasi Daerah**. Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan invetasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.

o. **Bidang Energi**. Semakin membaiknya pengelolaan energi, dicerminkan dengan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, penyiapan desain dan rencana induk energi regional Kota Banjarbaru, meningkatnya upaya efisiensi energi, meningkatnya upaya konservasi dan hemat energi, meningkatnya kemampuan pasokan energi, meningkatnya akses energi bagi masyarakat perdesaan serta semakin berdayanya masyakarakat dalam program pembangunan energi yang berkelanjutan.

p. **Bidang Infrastruktur Wilayah**. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengembangakan sistem transportasi serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah strategis pada tahap ini, ditandai dengan peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, melalui penyelesaian pembangunan jalan horizontal, pembangunan jalan. Berkenaan dengan penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur transportasi jalan, dilakukan tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan jalan antar wilayah.

q. ***Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup***. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan

lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, mangrove dan terumbu karang, tercapainya kawasan lindung sebesar 35% dari luas Kota Banjarbaru, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana. Upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah diarahkan melalui integrasi aspek lingkungan dalam kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun sinergitas antar daerah serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai *Eco-City*.

r. **Bidang Kependudukan**. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah.

s. **Bidang Politik**. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penatahan hubungan eksekutif dan legislatif, penyusunan rencana induk daerah otonom, penataan daerah otonom serta pengembangan kerjasama dengan institursi Kota Banjarbaru dengan institusi lainnya.

t. **Bidang Hukum dan HAM**. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu pentaan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.

u. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.

v. **Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik**. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi mela lui pengembangan kemampuan aparatur, pening katan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan dalam rangka penguatan daya saing kelurahan; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan

yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS). Disamping itu guna meningkatkan kualitas pembangunan Kota Banjarbaru dalam perspektif pelibatan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan perhatian khusus secara melembaga pada aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, pemberdayaan perempuan dan pengembangan olah raga.

w. **Bidang Keuangan Daerah**. Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan pembelian saham BUMD yang maju.

x. **Bidang Tata Ruang**. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan ditetapkannya Perda tentang RTRWP Kota Banjarbaru, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRWP Kota Banjarbaru dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antara kabupaten/kota. Perwujudan Struktur Ruang Kota Banjarbaru ditandai dengan mulai terbentuknya Sistem Kota yang dicapai melalui Pengembangan Pusat Kegiatan (PK). Perwujudan Pola Ruang Kota Banjarbaru ditandai dengan peningkatan fungsi dan luasan menuju capaian 40% Kawasan Lindung dan kawasan berfungsi lindung lainnya, serta menuju penetapan lahan sawah abadi dalam rangka ketahanan pangan Kota Banjarbaru. Perwujudan Struktur dan Pola Ruang tersebut juga didukung melalui langkah persiapan dalam Pengembangan Kawasan Andalan dsk, Pengembangan Kawasan Andalan, Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial nasional.

3. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2016-2020)

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga ditujukan untuk Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Bidang Pendidikan**. Sasaran utama bidang pendidikan yaitu penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan bagi kabupaten/kota se-Kota Banjarbaru pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Pada periode ini juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan.

Adapun upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu berbentuk beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam pembangunan.

b. **Bidang Kesehatan**. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

c. **Bidang Keagamaan**. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Banjarbaru memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara

   Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama.

d. **Bidang Kebudayaan**. Perhatian di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. **Bidang Ketenagakerjaan**. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan pening katan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

f. **Bidang Pemuda dan Olah Raga**. Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung

pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kota Banjarbaru sebagai kota yang mampu berprestasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event olahraga internasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat Kota Banjarbaru.

g. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

h. **Bidang Sosial**. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i. **Bidang IPTEK**. Diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian nasional maupun internasional dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkakan daya saing ekonomi daerah, persiapan Kota Banjarbaru sebagai pusat pengembangan SDM dan sarana prasarana IPTEK secara nasional, serta perluasan perwujudan kota berbasis teknologi informasi.

j. **Bidang Industri dan Perdagangan**. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

k. **Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**. Pada bidang ini diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan hulu sampai dengan hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Banjarbaru. Pemantapan mutu merupakan komitmen Kota Banjarbaru untuk merespons setiap tuntutan konsumen, terutama terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya.

   Pada tahap ini diperlukan :

   1). Pengelolaan kualitas rantai produksi (*Supply Chain Management*) yang efektif dan efisien;
   2). Budaya mutu dan merk;
   3). Sertifikasi dan standisasi produk;
   4). Respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen;
   5). Kelembagaan penunjang yang efisien.

l. **Bidang Kepariwisataan**. Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata Kota Banjarbaru, dimana persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan.

m. **Bidang KUMKM**. Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM

yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kota Banjarbaru dan dan memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional.

n. **Bidang Investasi Daerah**. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi.

o. **Bidang Energi**. Dalam upaya kemandirian energi regional, maka pada tahap ketiga, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, diupayakan untuk mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, semakin meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi, pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangakan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut.

p. **Bidang Infrastruktur Wilayah**. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru yang produktif dan memiliki daya saing. Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi (*Mass Rapid Transport*), jaringan infrastruktur transportasi, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi.

q. **Bidang Kependudukan**. Pada periode ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya wilayah.

r. **Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**. Daya dukung lingkungan Kota Banjarbaru yang mantap atau sebagai *Eco-City* dicerminkan oleh proses penataan ruang Kota Banjarbaru yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota-kota, secara seimbang sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumberdaya alam dan membaiknya infrastruktur alam serta fungsi lingkungan hidup, terutama dari ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kulaitas udara dan ekosistem pesisir yang lebih baik, terwujudnya optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal. Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan

hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan cekungan air bawah tanah, tercapainya luasan 40% kawasan lindung dari luas Kota Banjarbaru.

Peningkatan efisiensi, efektivitas dari nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup tetap menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan yang memadai bagi proses pembangunan di Kota Banjarbaru. Sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) kualitas lingkungan.

s. **Bidang Politik**. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*). Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik, penataan daerah otonom di Kota Banjarbaru serta pemantapan kerjasama dengan institusi di Kota Banjarbaru dengan institusi lainnya.

t. **Bidang Hukum dan HAM**. Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

u. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

v. **Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik**. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi kepada pelayanan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan kelurahan diarahkan pada pengembangan kapasitas kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.

w. **Bidang Keuangan Daerah**. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah, disamping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah Kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.

x. **Bidang Tata Ruang**. Perkembangan wilayah di Kota Banjarbaru semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan

penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 40% dan Kawasan Budidaya sebesar 60% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Pengembangan wilayah Kota Banjarbaru dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis. Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir (selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

4. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021-2025)

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat ditujukan untuk Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat ini adalah :

a. **Bidang Pendidikan**. Perhatian bidang pendidikan pada periode 2021-2025 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

   Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.

   Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

   Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh.

   Sedangkan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

b. **Bidang Kesehatan**. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

c. **Bidang Keagamaan**. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Banjarbaru diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

   Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

d. **Bidang Kebudayaan**. Perhatian di bidang kebudayaan di Kota Banjarbaru diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Kota Banjarbaru.

e. **Bidang Ketenagakerjaan**. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan. Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industril untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

f. **Bidang Pemuda dan Olah Raga**. Pembangunan bidang pemuda dan olaharaga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mempertahankan keunggulan olahraga Kota Banjarbaru di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Banjarbaru.

g. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

h. **Bidang Sosial**, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i. **Bidang IPTEK**. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

j. **Bidang Industri dan Perdagangan**. Pada bidang industri dan perdagangan,

diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.

k. **Bidang Pertanian**, Perikanan dan Kehutanan. Pada tahap ini, pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem pertanian. Untuk itu diperlukan: (1) Perusahaan induk (Holding Company) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2) Kolaborasi bisnis di tingkat Kota Banjarbaru dan kab/kota lain, dan (3) Relasi bisnis di pasar internasional. Pada tahap ini pertanian Kota Banjarbaru sudah berkembang menembus batas-batas wilayah. Konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global akan semakin kuat. Selama tahapan sebelumnya dapat dilalui dengan baik, pada tahap pengembangan jaringan ini akan dapat dilalui dengan baik.

l. **Bidang Kepariwisataan**. Sementara itu, pada bidang pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Kota Banjarbaru, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata.

m. **Bidang KUMKM**. Pada tahapan ini, pengembangan KUMKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.

n. **Bidang Investasi Daerah**. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.

o. **Bidang Energi**. Semakin mantapnya kemandirian energi pada tahap ini diharapkan dapat tercapai dengan mantapnya kelurahan mandiri energi, mantapnya infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, tingkat efisiensi pendayagunaan energi semakin baik, meningkatnya pengembangan energi alternatif, meningkatnya investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi.

p. **Bidang Infrastruktur Wilayah**. Arah pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi (Mass Rapid Transport), terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimal nya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi.

q. **Bidang Kependudukan**. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya.

r. **Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**. Dalam rangka semakin

memantapkan daya dukung lingkungan Kota Banjarbaru, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui, membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan waduk besar, fungsi kawasan lindung, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. Terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana.

s. **Bidang Politik**. Diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Kota Banjarbaru serta penguatan kerjasama antar institusi.

t. **Bidang Hukum dan HAM**. Pada Bidang Hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

u. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

v. **Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik**. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel dibidang pajak daerah dan retribusi.

w. **Bidang Keuangan Daerah**. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya – upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

x. **Bidang Tata Ruang**. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kota Banjarbaru semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.

Melalui koordinasi penataan ruang pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Banjarbaru telah sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan

dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung, dan terjaminnya lahan untuk sawah, serta optimalnya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

BAB. VI
KAIDAH PELAKSANAAN

RPJP Daerah yang berisi visi dan misi berjangka waktu 20 (dua puluh) serta diikuti dengan Arah Pembangunan setiap 5 tahun merupakan pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi. dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pemerintah agar tercipta sebuah kesinambungan di dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025, beberapa hal yang harus diperhatikan agar perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan sinergi dan terlaksana dengan baik, adalah:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 ini yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 memberikan visi, misi, dan arah penyelenggaraan pembangunan yang nantinya akan merupakan acuan bagi setiap Walikota Kota Banjarbaru
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru ini merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan referensi bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Banjaebaru.
- Pemerintah Kota wajib menerapkan 3 (tiga) pilar dari *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah Kota Banjarbaru 2005-2025 ini.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 secara esensi menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah termasuk DPRD. Untuk itu perlu dalam proses pelaksanaannya perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

  (1) Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah Kota Banjarbaru 2006-2025 dengan sebaik-baiknya.

  (2) Walikota Kota Banjarbaru dalam menetapkan visi, misi dan arah pembangunan dalam masa pemerintahannya berkewajiban untuk berpedoman kepada RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 ini. Selanjutnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banjarbaru akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

  (3) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah (Walikota).

- Mengingat urgensi RPJP Daerah bagi keberlangsungan pembangunan Kota Banjarbaru dalam jangka panjang dan karena ketidakterkaitannya pada kepentingan politik sehingga semata-mata hanya ditujukan bagi penyelenggaraaan pembangunan

dan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan seutuhnya maka terkandung tanggung jawab untuk menjaga dan menjamin implementasinya dilapangan.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Walikota dan seluruh SKPD bersama sama dengan masyarakat luas dan pengusaha mempunyai berkewajiban moril untuk menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam Pemerintah Kota Banjarbaru.

Tabel Lampiran 1. Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Isu Strategis 4	
Demografi, Sosial dan Budaya	□		□		□	Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Banjarbaru diperkirakan mencapai 276.572 jiwa.	□	
Ekonomi	□		□	Pertumbuhan ekonomi yang cenderung setelah pasca krisis tahun 1997 melalui sektor lembaga keuangan, bangunan, listrik, perdagangan, angkutan dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5% belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penganggaran dan penduduk miskin.	□		□	
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	□	Publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Kota Banjarbaru belum dapat diimplementasikan dengan maksimal	□		□		□	
Infrastruktur Wilayah	□		□	Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman	□		□	

				memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat				
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	□		□		□	Masih tingginya tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya, kerusakan dan berkurangnya luasan kawasan yang dilindungi, pencemaran udara perkotaan, pengrusakan dan kebakaran lahan, pencemaran dan sedimentasi sungai, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan sumber daya air yang kurang terkendali, hal ini diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan serta rendahnya pemahaman resiko bencana, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu	□	
Politik	□		□		□		□	Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan
Hukum dan HAM	□		□		□		□	Proses demokratisasi mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional pada akhirnya berdampak

								terhadap daerah. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam implementasinya
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	□		□		□		□	Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Banjarbaru merupakan daerah yang direncanakan akan menjadi pusat Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dan merupakan lintasan yang menghubungkan beberapa wilayah
Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	□		□		□	Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam mewujudkan proporsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas wilayah. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan lahan terbangun yang cenderung acak dan menyebar, serta degradasi lingkungan di wilayah tersentu merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan.	□	
Aparatur	□		□		□		□	Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal tersebut

							mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Keuangan Daerah	□		□		□		□ Kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat

Tabel Lampiran 2. Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan	Kota Banjarbaru sebagai kota yang bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terampil dengan disertai nilai-nilai agama dan budaya lelubur. Kreatifitas dan ketrampilan penduduk kota Banjarbaru menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru	Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan
2.	Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan	Sebagai sebuah kota yang akan banyak menyandarkan perekonomiannya pada pergerakan barang dan terutama jasa, maka peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ekonomi sangat diperlukan, kualitas jalan yang bagus dan angkutan yang layak misalnya Kota Banjarbaru menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan dengan 13 (tga belas) kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah dan dan Kalimantan Timur adalah sebuah keuntungan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan. Dalam pembangunan kota, pengembangannya lebih banyak diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar pada barang dan jasa. Iklim usaha juga menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor industri di Kota Banjarbaru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.	
3.	Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman	Perkembangan kota Banjarbaru telah menyebabkan peningkatan permintaan perumahan bagi penduduk. Implikasinya, peranan tata ruang kota menjadi sangat penting sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen kota (*urban growl*) di masa depan. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representatif dan berwawasan lingkungan menjadi agenda jangka panjang pembangunan Kota Banjarbaru.	
4.	Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan	Sebagai kota pelayanan publik harus bertumpu pada *good governance* / tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial.	

Tabel Lampiran 3. Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan	Kota Banjarbaru sebagai kota yang bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terampil dengan disertai nilai-nilai agama dan budaya leluhur. Kreatifitas dan ketrampilan penduduk kota Banjarbaru menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru	Terwujudnya Kota Banjarbaru yang mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Memiliki keunggulan untuk mewadahi kegiatan usaha jasa serta pedagangan yang menjadikannya daya tarik bagi pelaku usaha deegan didukung oleh sumber daya manusia yang handal serta tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan sosial dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi dan kemandirian dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.
	Sebagai sebuah kota yang akan banyak menyandarkan perekonomiannya pada pergerakan barang dan terutama jasa, maka peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ekonomi sangat diperlukan, kualitas jalan yang bagus dan angkutan yang layak misalnya Kota Banjarbaru menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan dengan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah dan dan Kalimantan Timur adalah sebuah keuntungan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan. Dalam pembangunan kota, pengembangannya lebih banyak diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar pada barang dan jasa. Ialim usaha juga menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor industri di Kota Banjarbaru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.	
	Perkembangan kota Banjarbaru telah menyebabkan peningkatan permintaan perumahan bagi penduduk. Implikasinya, peranan tata ruang kota menjadi sangat penting sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen kota (*urban sprawl*) di masa depan. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representatif dan berwawasan lingkungan menjadi agenda jangka panjang pembangunan Kota Banjarbaru.	
	Sebagai kota pelayanan publik harus bertumpu pada *good governance* / tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial.	

Tabel Lampiran 4. Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder Pembangunan								Misi
			Masyarakat		Pemerintah Daerah		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
1.	Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan	Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan	(x)	Mewujudkan SDM yang berkualitas	(√)	Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas					Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas
2.		Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan			(x)	Mengembangkan potensi ekonomi lokal	(√)	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah			Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah
3.		Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman	(x)	Mewujudkan perencanaan tata ruang dan wilayah	(√)	Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang					Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang
4.		Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan	(√)	Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik		Mewujudkan kota jasa pemerintahan yang berbudaya dengan menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace)					Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik

Tabel Lampiran 5. Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja

No.	Pokok Visi	Misi	Sasaran pokok	Indikator dan target
1.	Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan	Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat/SDM yang berkualitas	APM : SD (98,8%) SMP (81%) SMA (70%) Angka Melek Huruf (100%) Usia Harapan Hidup (78 tahun)
2.	Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	Terwujudnya sistem dan iklim daerah yang aman, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan penguasaan IPTEK dan memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi lokal terutama sektor *economic base* dengan bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing	Pertumbuhan PDRB (6,93 %) PDRB per Kapita (33,4 juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (7 - 6 %) Tingkat penduduk miskin (3 - 2 %)
3.	Banjarbaru sebagai Kota Pemukiman	Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Terwujudnya pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Cakupan pelayanan air Bersih (90 %) Pengelolaan Persampahan (90 %) Fasilitas Umum (90%) Ruang Terbuka Hijau (20 %)
4.	Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan demokrasi dan keadilan sosial.	Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik	Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan (*good local governance*), pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan	Tingkat Pelayanan Publik (sangat baik) Pemenuhan kuantitas perkantoran (100 %)

Tabel Lampiran 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan	Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dibidang pendidikan dan kesehatan	APM : SD (96%) SMP (77%) SMA (61) Angka Melek Huruf (97%) Usia Harapan Hidup (67 tahun)	(Tahap I 2005-2010) Peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dibidang pendidikan dan kesehatan	APM : SD (97%) SMP (78,5%) SMA (63,5%) Angka Melek Huruf (99%) Usia Harapan Hidup (71 tahun)	(Tahap II 2011-2015) Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastrutur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif.
		Terwujudnya masyarakat yang sehat, berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, serta menguasai IPTEK.	APM : SD (98) SMP (79) SMA (66) Angka Melek Huruf (100%) Usia Harapan Hidup (75 tahun)	(Tahap III 2016-2020) Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan
		Terwujudnya masyarakat yang sehat, berperilaku cerdas, agamis dan berbudi pekerti luhur, serta menguasai IPTEK.	APM : SD (98,8%) SMP (81%) SMA (70%) Angka Melek Huruf (100%) Usia Harapan Hidup (78 tahun)	(Tahap IV 2021-2025) Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyerapan angkatan Kerja Pengurangan penduduk miskin	Pertumbuhan PDRB (5,7%) PDRB per Kapita (9,5 juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (9,15%) Tingkat penduduk miskin (7,0%)	(Tahap I 2005-2010) Peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia

		Akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyerapan angkatan Kerja Pengurangan penduduk miskin	Pertumbuhan PDRB (8,16 %) PDRB per Kapita (15,11 juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (9,15-8%) Tingkat penduduk miskin (5,5-4%)	(Tahap II 2011-2015) Peningkatan Aksessibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastrutur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif.
		Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan Meningkatnya daya beli masyarakat Penyerapan angkatan kerja Pemerataan Pendapatan	Pertumbuhan PDRB (6,46%) PDRB per Kapita (22,65 juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (8 - %) Tingkat penduduk miskin (4-3%)	(Tahap III 2016-2020) Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan
		Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan Meningkatnya daya beli masyarakat Penyerapan angkatan kerja Pemerataan Pendapatan	Pertumbuhan PDRB (6,93 %) PDRB per Kapita (35,4 juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (7-6%) Tingkat penduduk miskin (3-2%)	(Tahap IV 2021-2025) Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
	Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Terwujudnya pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Cakupan pelayanan air Bersih (43%) Pengelolaan Persampahan (55%) Fasilitas Umum (60%) Ruang Terbuka Hijau (20%)	(Tahap I 2011-2015) Peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia
		Terwujudnya wilayah permukiman yang representatif dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Cakupan pelayanan air Bersih (74%) Pengelolaan Persampahan (75%) Fasilitas Umum (70%) Ruang Terbuka Hijau (20%)	(Tahap II 2011-2015) Peningkatan Aksessibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastrutur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif.

		Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, aksessible dan berwawasan lingkungan	Cakupan pelayanan air Bersih (80%) Pengelolaan Persampahan (80%) Fasilitas Umum (80%) Ruang Terbuka Hijau (20 %)	(Tahap III 2016-2020) Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan
		Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, aksessible dan berwawasan lingkungan	Cakupan pelayanan air Bersih (90%) Pengelolaan Persampahan (90%) Fasilitas Umum (90%) Ruang Terbuka Hijau (20%)	(Tahap IV 2021-2025) Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
	Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik	Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetah	Tingkat Pelayanan Publik (sangat baik) Pemenuhan kuantitas perkantoran (70%)	(Tahap I 2011-2015) Peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia
		Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan	Tingkat Pelayanan Publik (sangat baik) Pemenuhan kuantitas perkantoran (70%)	(Tahap II 2011-2015) Peningkatan Aksessibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif.
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	Tingkat Pelayanan Publik (sangat baik) Pemenuhan kuantitas perkantoran (80%)	(Tahap III 2016-2020) Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntable dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	Tingkat Pelayanan Publik (sangat baik) Pemenuhan kuantitas perkantoran (100%)	(Tahap IV 2021-2025) Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.

Tabel Lampiran 7. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun I : Peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia							
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dibidang pendidikan dan kesehatan	APM	SD 94,89 % SMP 76,39 % SMA 60,63 %	SD 96 % SMP 77 % SMA 61 %				
	AMH	96,22 %	97 %				
	AHH	66,80 tahun	67 tahun				
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, Penyerapan angkatan Kerja, dan Pengurangan penduduk miskin	Pertumbuhan PDRB	5,05 %	5,7 %				
	PDRB per Kapita	6,6 juta	9,5 juta				
	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,38 %	10,0 %				
	Tingkat penduduk miskin	4,53 %	5,20%				
3. Terwujudnya pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Cakupan pelayanan air Bersih	25 %	34 %				
	Pengelolaan Persampahan	55 %	55 %				
	Fasilitas Umum	60 %	60 %				
	Ruang Terbuka Hijau	20 %	20 %				
4. Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan	Tingkat Pelayanan Publik	Sangat baik	Sangat baik				
	Pemenuhan kuantitas perkantoran	70%	70%				
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun II : Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastrutur strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta penataan pemerintahan daerah yang efektif.							
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dibidang pendidikan dan kesehatan	APM	SD 94,89 % SMP 76,39 % SMA 60,63 %	SD 96 % SMP 77 % SMA 61 %	SD 97 % SMP 78,5 % SMA 63,5 %			
	AMH	96,22 %	97 %	99 %			

	AHH	66,80 tahun	67 tahun	71 tahun			
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, Penyerapan angkatan Kerja, dan Pengurangan penduduk miskin	Pertumbuhan PDRB PDRB per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat penduduk miskin	5,05 % 6,6 juta 9,38 % 4,53 %	5,7 % 9,5 juta 9,15 % 5,20%	6,16 % 15,11 juta 9,15 - 8 % 5,5 - 4 %)			
3. Terwujudnya wilayah permukiman yang representatif dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Cakupan pelayanan air Bersih Pengelolaan Persampahan Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau	25 % 55 % 60 % 20 %	34 % 55 % 60 % 20 %	50 % 75 % 70 % 20 %			
4. Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berbasis pengetahuan	Tingkat Pelayanan Publik Pemenuhan kuantitas perkantoran	Sangat baik 70 %	Sangat baik 70 %	Sangat baik 70 %			
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun III : Pencapaian kemandirian masyarakat Kota Banjarbaru disegala sendi kehidupan							
1. Terwujudnya masyarakat yang sehat, berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, serta menguasai IPTEK.	APM AMH AHH	SD 94,89 % SMP 76,39 % SMA 60,63 % 96,22 % 66,80 tahun	SD 96 % SMP 77 % SMA 61 % 97 % 67 tahun	SD 97 % SMP 78,5 % SMA 63,5 % 99 % 71 tahun	SD 98 % SMP 79 % SMA 66 % 100 % 75 tahun		
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Meningkatnya daya beli masyarakat, Penyerapan angkatan kerja, Pemerataan Pendapatan	Pertumbuhan PDRB PDRB per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat penduduk miskin	5,05 % 6,6 juta 9,38 % 4,53 %	5,7 % 9,5 juta 9,15 % 5,20%	6,16 % 15,11 juta 9,15 - 8 % 5,5 - 4 %	6,46 % 22,65 juta 8 - 7 % 4 - 3 %		
3. Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, aksessable dan berwawasan lingkungan	Cakupan pelayanan air Bersih Pengelolaan Persampahan Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau Tingkat Pelayanan Publik	25 % 55 % 60 % 20 % Sangat baik	34 % 55 % 60 % 20 % Sangat baik	50 % 75 % 70 % 20 % Sangat baik	80 % 80 % 80% 20 % Sangat baik		

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	Tingkat Pelayanan Publik Pemenuhan kuantitas perkantoran						

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR